I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak kaum kolonial menginjakkan kakinya di nusantara ini, banyak sudah timbul perang akibat ketidaksukaan rakyat setempat kepada para kolonialis. Salah satu perang yang terjadi di nusantara dan merupakan perang yang paling sengit dalam mempertahankan daerah adalah Perang Aceh. Perang ini adalah manifestasi dari ketidaksukaan rakyat Aceh pada Belanda, yang menjadi kaum kolonial saat itu.
”Di antara Perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia dalam abad 19, perlawanan di Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda” (Marwati Djoened P & Nugroho N, 1993 : 241)

Pada awalnya Aceh merupakan negara yang berdaulat, yang kedaulatannya diakui oleh Inggris dan Belanda. Dalam Traktat London, Inggris dan Belanda berjanji antara lain akan sama-sama menghormati kedaulatan Aceh. tentu saja hal ini bisa dimengerti karena keduanya sedang sibuk dengan konsolidasi kekuasaan di koloni masing-masing apalagi pada waktu itu di Eropa, perang Napoleon baru saja berakhir (Ibrahim Alfian, 1987 : 5).

Perubahan-perubahan kebijakan terhadap Aceh yang dijalankan oleh pemerintah Inggris juga disebabkan peningkatan persaingan di antara kekuatan-kekuatan Eropa untuk mendapatkan wilayah jajahan. Dampak dari itu, maka pemerintah

Inggris beranggapan bahwa akan lebih baik membiarkan Belanda menguasai Aceh daripada negara yang lebih kuat seperti Prancis atau Amerika (M.C Ricklefs, 1989 : 219). Hasilnya adalah terwujudnya Perjanjian Sumatera antara Inggris dan Belanda pada bulan November 1871, dimana dalam perjanjian itu Belanda diberi kebebasan mutlak di Sumatera atas persetujuan Inggris. Perjanjian ini merupakan pengumuman bahwa Belanda ingin menguasai Aceh.

> "perjanjian ini dianggap sebagai salah satu pertukaran yang terbesar selama penjajahan, Belanda menyerahkan Pantai Emas di Afrika kepada Inggris, Inggris memperbolehkan pengiriman kuli-kuli kontrak India ke Suriname dan perdagangan Inggris dan Belanda mempunyai hak yang sama di Sumatera dari Siak ke utara" (Ibid, 219).

Maka sejak saat itulah Belanda terus gencar memperluas daerah kekuasaannya. Hal ini telah disadari oleh kerajaan Aceh, bahwa dengan ditandatanganinya Traktat Sumatra akan mengancam kedudukan kerajaan Aceh. Maka untuk itu Aceh berusaha memperkuat dirinya dengan meminta bala bantuan dari Negara-negara lain. Dalam bulan Januari 1873 Sultan Aceh telah mengirimkan seorang utusan, Habib Abdurrahman, ke Turki untuk meminta bantuan apabila Belanda menggunakan kekerasan dan berusaha menundukkan Aceh. Aceh meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan Italia ketika konsul-konsul itu tiba di Singapura dengan kapal-kapalnya. (Ibrahim Alfian. Hal 64)

Diawali dengan sebuah ultimatum, pada tanggal 26 Maret 1873 F.N. Nieuwenhuyzen selaku komisaris pemerintah Belanda menyampaikan peryataan atau manifesto perang terhadap kerajaan Aceh (Ibrahim Alfian, 1987 : 17). Setelah beberapa hari peperangan berlangsung, Belanda dapat menguasai Masjid Raya Aceh, tetapi kemudian rakyat Aceh dapat mengusir pasukan-pasukan

Belanda dari masjid tersebut. Dalam pertempuran-pertempuran ini pasukan-pasukan Aceh senantiasa mengumandangkan kalimat *la ilaha illa'llah*, tiada Tuhan selain Allah.

Dengan senjata yang lebih canggih Belanda berhasil memukul mundur pasukan Aceh hingga sampai pada mesjid Raya. Belanda berhasil menduduki benteng-benteng yang ada di dekat pantai Aceh, dan untuk selanjutnya digunakan sebagai tempat pasukan militer Belanda. Sebenarnya yang menjadai target utama dari penyerangan pasukan Belanda adalah Mesjid Raya, tetapi pasukan Aceh sangat gigih mempertahankannya. Pasukan Belanda akhirnya mengepung daerah di sekitar Mesjid Raya tersebut, tapi mereka mengalami kesulitan untuk masuk lebih jauh. Karena pertahan lascar Mesjid kuat, panglima Belanda Kohler memerintahkan untuk menembakkan peluru api ke arah Mesjid Raya. Akibat serangan yang dilancarkan pasukan Belanda itu Masjid menjadi terbakar sehingga membuat pasukan Aceh menarik dari kawasan Mesjid. Pada tanggal 14 April 1873 pasukan Belanda telah merebut dan menduduki areal Mesjid raya. Waktu Kohler kemudian memeriksa situasi mesjid yang telah direbutnya, sekonyong-konyong ia ditembak oleh seorang prajurit Aceh, sehingga ia tewas. (Ibrahim Alfian, Hal 66)

Ketika Aceh telah kehilangan Mesjid Raya untuk dipertahankan, maka Sultan mengumpulkan sebagian kekuatan di sekitar Istana, sedang yang lain difungsikan untuk menyerang daerah yang telah direbut oleh Belanda. Belanda berusaha untuk mendekati daerah istana dengan megadakan penyerangan ke daerah istana Aceh, usaha ini akhirnya dapat diatasi oleh tentara Aceh pada tanggal 16 April 1873 dan

kemudian terjadilah pertempuran yang sengit antara keduanya, dikarenakan tidak berhasil juga mendekati daerah istana Belanda dengan terpaksa mundur lagi ke masjid. Dalam pertempuran ini Belanda mendapat kerugian atas gigihnya perlawanan tentara Aceh, diantaranya sembilan perwira dan seratus enam belas serdadu Belanda tewas dalam pertempuran tersebut. (Ibrahim alfian, Hal 18)

Usaha Belanda tersebut untuk mengatasi perlawanan dari tentara Aceh berkali-kali kandas dan berkali-kali menemui jalan buntu. Dikarenakan usahanya selalu menemui jalan buntu Belanda yang juga atas persetujuan dari Pemerintah Belanda akhirnya meninggalkan pantai Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda tidak dapat dipandang remeh oleh Pemerintah Belanda, apalagi dengan kematian dari salah seorang Jenderal Belanda yaitu Jenderal Kohler merupakan suatu bukti nyata yang dapat menjadikan pemikiran bagi Pemerintah Belanda bahwa perlawanan dari masyarakat Aceh tidak dapat dianggap ringan.

Dengan kegagalan serangan yang pertama ke Aceh, tidak membuat Belanda patah arang untuk menduduki istana Aceh. Belanda mencoba dengan mengirimkan pasukannya lagi untuk menyerang Aceh, kali ini berbeda dengan serangan yang pertama akan Aceh, Belanda mengirimkan lebih banyak tentara untuk serangan kali ini. Pada tanggal 6 November 1873, Jenderal J. Van Swieten diangkat menjadi pimpinan pasukan expedisi kedua yang akan membawa pasukan yang lebih besar berkekuatan sekitar 8000 orang. Selama mengadakan persiapan untuk keperluan ini Belanda mengadakan Blokade terhadap pantai Aceh dengan

menggunakan angkatan lautnya untuk menghalangi kerajaan Aceh berhubungan dengan dunia luar.

Pada tanggal 9 Desember 1873 pasukan Belanda tersebut telah mendarat di Aceh, tepatnya di daerah Kuala Lue. Kedatangan pasukan tersebut disambut dengan tembakan senapan-senapan dari para pejuang Aceh. Para pejuang Aceh tahu akan tujuan dari datangnya pasukan Belanda tersebut yaitu akan merebut istana, maka mereka segera memperkuat pertahanan istana. Berbagai bantuan datang dari berbagai daerah di Aceh untuk memperkuat barisan pertahanan di istana Aceh. Pertarungan yang tak kalah sengitnya juga terjadi di daerah masjid raya, karena Belanda juga berusaha menduduki daerah mesjid raya tetapi pasukan lebih dipusatkan di daerah istana. (Ibrahim Alfian, Hal 18)

Usaha rakyat Aceh untuk memepertahankan istana dari genggaman Belanda akhirnya mengalami kekalahan juga, istana akhirnya diduduki oleh Belanda pada tanggal 24 Januari 1874 tetapi Sultan dan juga seluruh orang-orang istana telah mengosongkan istana pada tanggal 15 Januari 1874 dan menyingkir ke Luengbata. Akhirnya daerah tersebut dijadikan kedudukan yang baru oleh sultan, usaha dari Jenderal Van Swieten untuk menangkap sultan selalu gagal dikarenakan sultan dan para panglimanya terus bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda walaupun istana telah diduduki oleh Belanda. Suatu keadaan yang tidak disangka telah terjadi, yaitu sultan telah terserang wabah kolera sehingga meninggal pada tanggal 28 Januari 1874.

Dengan meninggalnya sultan maka beberapa panglima sagi bersepakat bahwa yang akan meneruskan kesultanan adalah putra sultan almarhum, Muhammad

Daudsyah. Merasa telah menguasai istana membuat Belanda telah menguasai Aceh, oleh karenanya Jenderal Van Swieten mengeluarkan proklamasi , bahwa Aceh telah mereka kuasai pada tanggal 31 Januari 1874, tetapi adanya keberadaan dari proklamasi tersebut tidak dihiraukan oleh para pejuang Aceh yang masih dengan gigih mempertahankan daerah mereka, terbukti dengan masih adanya perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan terhadap Belanda di daerah-daerah. Belanda menyangka bahwa dengan menduduki *dalam* dan sebagian kecil daerah Aceh besar serta dengan secarik kertas proklamasi sudah cukup untuk membuat negeri Aceh yang selebihnya bertekuk lutut. Yang terjadi ialah perlawanan di Aceh semakin meningkat.

Pada tanggal 20 April 1874 Jenderal Van Swieten diganti Mayor Jenderal J.L.J.H. Pel. Jenderal yang baru ini merencanakan untuk menguasai daerah-daerah Krueng Raba dan Krueng Raya dengan maksud untuk dapat membangun garis pertahanan melalui daerah sagi XXVI Mukim. Ini berguna untuk mendirikan sebuah garis pos melalui Aceh besar denagn harapan dapat memutuskan hubungan Aceh Besar dengan laut. Dengan demikian diharapkan arti politik Acehterhadap dunia luar akan lenyap, sedangkan dalam bidang perniagaan akan tergantung kepada Belanda. Selama pimpinan dipegang oleh Jenderal Pel banyak daerah di Aceh yang mulai direbut oleh Belanda diantaranya Olee lee, Nangrue, Punge Blang Cut, Lamara Uleyo, Kuta Alam, Lamara dan Lainnya. Akhirnya kubu Belanda mendapat pukulan setelah pasukan Aceh yang menyerang kubu Belanda di Tunga berhasil menembak Jenderal Pel sehingga ia tewas. Usaha Belanda selanjutnya adalah mengutamakan untuk memeperkuat lini penutup (*afsluitingslinie)* di daerah yang telah Belanda kuasai.

Salah seorang ulama Aceh yang diutus oleh Sultan guna mendapatkan bantuan dari Turki pada awal sebelum terjadinya Perang Aceh yaitu Habib Abdurrahman pulang dari Turki pada bulan Maret 1879 membuat perlawanan rakyat Aceh semakin giat. Penyerangan lebih dititik beratkan kepada penyerangan kepada benteng-benteng Belanda. Penyerangan Habib terutama bertujuan untuk mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda yang merupakan lini penutup (*afsluitingslinie*). Selain penyerangan terhadap pos-pos militer dan pencegatan terhadap konvoi pasukan Belanda, dilakukan pula perusakan terhadap bangunan-bangunan militer. Kembalinya Habib Abdurrahman ke Aceh telah menambah kegairahan baru di kalangan pejuang Aceh.

"Habib berhasil mengumpulkan dana beribu-ribu ringgit pemberian sebagian uleebalang di pantai utara dan timur. Ia berhasil pula mengumpulkan beribu-ribu rakyat dalam pasukannya dan mendapatkan bantuan dari T. Bentara Keumangan, raja Gigieng (Pidie)" (Ibrahim Alfian, : 71).

Selama kemimpinan dari Habib Abdurrahman banyak kesulitan yang ditimpa oleh Belanda dikarenakan mendapat perlawanan yang sangat sengai dari para rakyat Aceh yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman. Suatu hal yang sedikit banyak memperlemah kekuatan pihak Aceh antara lain menyerahnya Habib Abdurrahman pada tanggal 13 Oktober 1878. Menyerahnya Habib Abdurrahman kemungkinan dikarenakan markas besarnya di Montasik telah direbut oleh Belanda dan karena kekalahannya dealam pertempurannya di Longi. (Ibrahim Alfian, Hal 73)

Pada tahun 1884 sultan Muhammad Daudsyah telah dewasa dan dengan dukungan Mangkubumi Tuanku Hasyim dan para ulama antara lain Teungku Cik Di Tiro telah aktif melakukan tugas sebagai sultan Aceh dengan berkedudukan di

Keumala. Dalam masa pemerintahan sultan ini perlawanan terhadap Belanda terus ditingkatkan, pertempuran yang menyebar di berbagai daerah di Aceh membuktikan bahwa perlawanan rakyat Aceh cukup sulit untuk ditaklukkan Belanda dalam masa yang singkat. Akhirnya Belanda menyadari bahwa penaklukkan Aceh dengan kekuatan senjata tidak akan berhasil, Belanda berusaha mencari jalan lain yaitu dengan cara memikat pemimpin-pemimpin pejuang Aceh. Teuku Umar sendiri menyerah kepada Belanda, tetapi karena tidak puas dengan perlakuan Belanda pada dirinya, ia kemudian melakukan perlawanan kembali terhadap Belanda. Belanda berusaha pula untuk mendekati pemimpn pejuang Aceh yang lainnya diantaranya Teungku Cik Di Tiro, Panglima Polim dan lainnya. Tetapi dikarenakan sikap keras Teungku Cik Di Tiro dan keyakinannya yang kuat dalam soal agama tidak dapat dilunakkan oleh Belanda.

Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh cara lain yaitu dengan jalan mengetahui rahasia kekuatan Aceh terurtama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Dr Snouck Hurgronjae yang paham tentang agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh yang naik haji di Mekkah, oleh Pemerintah Hindia Belanda dipandang sebagai seorang yang tepat untuk diberi tugas memecahkan kesulitan-kesulitan yang menyangkut masalah penaklukan Aceh. Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje dapat diketahui bahwa Sultan Aceh tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak mendapat persetujuan dari kepala-kepala bawahannya. Dengan demikian meskipun telah menundukkan sultan tidak berarti bahwa kepala-kepala bawahan dengan sendirinya akan tunduk, juga pengaruh dari para ulama-ulama sangat kuat pada rakyat, oleh karenanya akan sulit untuk menundukkan perlawanan rakyat Aceh

yang kuat akan keyakinan agama tersebut. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat diperbuat untuk meredakan perlawanan yang fanatik dari kaum ulama, jadi mereka harus ditumpas sampai habis dan pemerintah Belanda harus mengandalkan kepada *uleebalang* (yang dilihat sebagai para pemimpin adat atau 'sekuler'). Belanda mencari-cari kaum *uleebalang* yang mau diajak untuk bekerjasama, yang mereka anggap setaraf dengan para bupati Jawa, para pemimpin adat yang mau mengimbangi pengaruh politik Islam.

"antara tahun-tahun 1874-1876 ada 31 uleebalang yang menandatangani perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian yang berjumlah enam pasal itu berbunyi :1) mengakui raja Belanda sebagai yang dipertuan yang sah, 2) memerintah dengan adil, menjaga ketertiban dan keamanan, 3) dengan segala kekuatan menentang perdagangan budak dan mengawasi perampokan, 4) member bantuan kepada orang-orang yang mengalami kerusakan kapal, 5) tidak memberikan tempat persembunyian kepada kawula pemerintah Hindia Belanda yang melakukan pelanggaran, 6) tidak akan mengadakan hubungan ketatanegaraan dengan Negara asing" (Ibid, 70-71).

Sementara itu Panglima Polim dan Sultan tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda, meskipun tempatnya berpindah-pindah. Penculikan istri Sultan oleh Belanda, demikian pula dengan tekanan-tekanan yang semakin berat dari pasukan Belanda, menyebabkan Sultan mengambil keputusan untuk menyerah. Upacara penyerahan Sultan kepada Belanda dilakukan pada tanggal 20 Januari 1903. Pemerintah Kolonial Belanda juga menggunakan siasat yang sama terhadap Panglima Polim, istri, ibu dan anak-anak Panglima Polim ditangkap oleh Belanda. Keadaan yang mendesak ini memaksa Panglima Polim bersama pengikutnya sebanyak 150 orang menyerah pada tanggal 6 September 1903. Dengan kejadian menyerahnya para pemimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda maka perlawanan rakyat Aceh ini menjadi sangat lemah dan memudahkan Belanda

untuk menanamkan kekuasaannya di daerah Aceh seluruhnya . Hal ini tidak berarti bahwa penentangan terhadap Belanda telah lenyap sama sekali. Ini dibuktikan dengan masih sering terjadinya perlawanan-perlawanan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Kolonial Belanda pada saat sesudahnya. (Ibrahim Alfian, Hal 197)

> "meskipun Sultan menyerah pada tahun 1903, ulama Tgk. Cot Plieng terus menyerukan agar orang-orang Aceh tetap gigih berjihad melawan kafir. Para ulama yang terkemuka yang masih melanjutkan perjuangan antara lain adalah Tgk. Di Lam Cut, Di Tanoh Mirah, Habib Teupin Wan, ketiganya berasal dari Mukim XXVI, Aceh Besar, Tgk Lam U dari Mukim XXII, Aceh Besar, Tgk di Barat dan Tgk. Di Mata Ie, di Aceh Utara" (Ibrahim Alfian, 1987 : 206).

Perlawanan rakyat Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda tidak dapat dipandang remeh oleh Pemerintah Belanda, apalagi dengan terbunuhnya salah seorang Jenderal Belanda yaitu Jenderal Kohler merupakan suatu bukti nyata yang dapat menjadikan pemikiran bagi Pemerintah Belanda bahwa perlawanan dari masyarakat Aceh tidak dapat dianggap ringan.

Dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Belanda menggunakan berbagai strategi, baik itu strategi militer maupun pendekatan-pendekatan terhadap kekuasaan lokal yakni Uleebalang. Namun demikian, tidak semua daerah di Aceh melakukan perlawanan kepada Belanda, ada juga daerah yang cenderung memihak kepada Belanda, kebanyakan dari daerah-daerah yang tidak melakukan perlawanan dan cenderung memihak Belanda adalah daerah-daerah yang banyak terletak dipinggir pantai. Mereka merasa rugi bila mengadakan perlawanan dikarenakan daerah pantai akan merasa kesulitan jika Belanda mengadakan blokade-blokade terhadap perdagangan.

Ada banyak kelemahan yang menyebabkan perjuangan rakyat Aceh mendapat halangan yaitu terjadi peperangan antara daerah Aceh sendiri, antara mereka yang bersikap memihak Belanda dengan mereka yang menentang Belanda, Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh cara lain yaitu dengan jalan mengetahui rahasia kekuatan Aceh terurtama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya.

Dr snouck Hurgronjae yang paham tentang agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh yang naik haji di Mekkah, oleh Pemerintah Hindia Belanda dipandang sebagai seorang yang tepat untuk diberi tugas memecahkan kesulitan-kesulitan yang menyangkut masalah penaklukan Aceh. Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje dapat diketahui bahwa ulama-ulama memainkan peranan penting dalam menggerakkan rakyat berperang sabil melawan Belanda. Menurut Snouck Horgronje tidak boleh ada keragu-raguan dalam menghadapi pihak Aceh yang tidak mau menyerah (Ibrahim Alfian, 1987 : 25).

Di samping itu, Sultan Aceh tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak mendapat persetujuan dari kepala-kepala bawahannya. Dengan demikian meskipun telah menundukkan sultan tidak berarti bahwa kepala-kepala bawahan dengan sendirinya akan tunduk, juga pengaruh dari para ulama-ulama sangat kuat pada rakyat, oleh karenanya akan sulit untuk menundukkan perlawanan rakyat Aceh yang kuat akan keyakinan agama tersebut.

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat diperbuat untuk meredakan perlawanan yang fanatik dari kaum ulama, jadi mereka harus

ditumpas sampai habis dan pemerintah Belanda harus mengandalkan kepada *uleebalang.*

> “Aceh tidak dapat ditaklukkan secara militer dan perang, karena masyarakat dengan kelompok agamawan terus bekerja secara bahu-membahu untuk melakukan strategi agitasi dan agresi Pemerintah Kolonial dengan berbagai cara yang selalu berbeda, setiap serangan ke pusat kekuasaan Pemerintah Belanda mengalami banyak kerugian ekonomi pemerintah kolonial” (http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Aceh, Christian Snouck Hurgronje ” 20,26,28, Februari 2008).

Belanda mencari-cari kaum *uleebalang* yang mau diajak untuk bekerjasama, yang mereka anggap setaraf dengan para bupati Jawa, para pemimpin adat yang mau mengimbangi pengaruh politik Islam.

Walaupun pihak Belanda mempunyai jumlah kekuatan serdadu yang besar dan senjata yang modern, tetapi mereka tidak mampu menaklukkan Aceh dalam waktu yang singkat. Pola dan siasat pertempuran Belanda masih memakai pola konvensional, sedangkan pejuang-pejuang Aceh menggunakan siasat disamping perang frontal juga menggunakan siasat perang gerilya.

Pada masa Gubernur Van Teijn timbul gagasan strategi baru yaitu pembentukan pasukan morsose yang dilatih secara khusus, mampu bertarung dalam segala cuaca, dan dengan disiplin yang keras.

> “pasukan morsose adalah semacam pasukan istimewa, atau pasukan berani mati, pasukan penggempur, pasukan penyerbu, atau pasukan kontra gerilya yang dibentuk khusus oleh Belanda untuk melawan pasukan muslimin Aceh atau dalam istilah perang modern sekarang “pasukan gerilya” atau kaum gerilya” (M.H. Gayo, 1983 : 116).

Strategi dengan menggunakan Pasukan Morsose ini nanti terus dilakukan oleh Belanda walaupun mereka mengganggap perang telah berakhir dengan takluknya Sultan pada tahun 1903. Pasukan Morsose digunakan oleh Belanda untuk menumpas gerakan-gerakan perlawanan rakyat Aceh yang masih terus berjuang mempertahankan tanah airnya.

Perang Aceh yang dimulai sejak tahun 1873 sampai saat Sultan Muhammad Daudsyah ditangkap di Pidie pada tahun 1903 ternyata belum juga berakhir. Pemerintah Kolonial Belanda mengganggap perang telah berakhir dengan ditandatanganinya surat pendek (*Korte Verklaring*" Traktat Pendek) tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Dimana isi surat pendek penyerahan diri itu berisikan : Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, Raja Berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda.

Namun demikian, perang melawan Belanda yang dilakukan oleh rakyat Aceh tetap berlangsung. Pada tahun 1904-1905 terjadi perang Gayo-Alas yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang khas dalam keseluruhan perang Aceh.

> "masih sedikit rakyat Indonesia yang mengetahui bahwa pada permulaan abad ke-20, yaitu pada bulan febuari 1904, di tengah-tengah daerah Pegunungan Aceh, di daerah terpencil Gayo dan Alas, telah berkobar suatu perang habis-habisan "Perang Gayo-Alas" melawan penyerbuan kaum imperialis kolonialis Belanda yang merupakan bagian dari Perang Aceh 1873"(Ibid, : 17).

Kekhasan dari perang Gayo-Alas ini dapat dilihat dimana rakyat Gayo-Alas baik pria, wanita dan anak-anak remaja telah mengangkat senjata melawan imperialis

kolonialis Belanda dengan gagah berani. Mereka bertempur dengan semangat perang sabil dan siap mati syahid melawan kaum kafir yang dating menyerang.

Disamping itu, kekhasan lainnya adalah jumlah jatuhnya korban dalam perang tersebut. Ribuan rakyat Gayo-Alas tewas akibat keganasan pasukan morsose. Van Daalen dengan pasukan morsosenya telah melancarkan pembunuhan besar-besaran, melakukan pembantaian habis-habisan terhadap rakyat Gayo dan Alas (M.H. Gayo, 1983 : 17). Kekejaman pasukan morsese di daerah Gayo-Alas telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemimpin Belanda, penyerangan ini mendapat kesan yang buruk dan menjadi pembicaraan yang luas dikalangan masyarakat Belanda.

"dalam sidang-sidang Parlemen Belanda tahun 1904 dan 1905 telah timbul perdebatan yang sengit mengecam dengan pedas kebijaksanaan politik Van Heutsz selaku Gubernur Militer Belanda di Aceh, dan mengenai kekejaman Van Daalen dalam serangannya ke daerah Gayo dan Alas. Van daalen dituduh sebagai algojo yang sadis dengan pasukan morsosenya dan Van Heustz dianggap orang yang paling bertanggungjawab terhadap perbuatan terror dan skandal yang dilakukan oleh Van daalen dengan serdadu-serdadu morsosenya itu (Ibid, 18-19)
Perlawanan rakyat Aceh, perang masih saja berlarut-larut bahkan sampai

menjelang kadatangan Jepang ke Aceh pada tahun 1942. Dengan kejadian menyerahnya para pemimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda maka perlawanan rakyat Aceh ini menjadi sangat lemah dan memudahkan Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di daerah Aceh seluruhnya. Hal ini tidak berarti bahwa penentangan terhadap Belanda telah lenyap sama sekali. Ini dibuktikan dengan masih sering terjadinya perlawanan-perlawanan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Kolonial Belanda pada saat sesudahnya. Perlawanan-perlawanan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Kolonial Belanda terus berlangsung

walaupun Belanda mengambil tindakan yang refresif terhadap para pemimpin perlawanan dan rakyat lainnya.

Serangan-serangan dari pasukan Belanda terus dihadapai oleh rakyat Aceh dengan segala kemampuan yang ada. Dalam Perang Aceh, sebelum Kraton Aceh Darussalam jatuh ke tangan Belanda, perang berlangsung secara terbuka, tetapi setelah jatuhnya Kraton Aceh maka peperangan berubah bentuknya menjadi perang gerilya. Demikian juga dengan perang Gayo-Alas, terjadi perubahan pola perlawanan anatar sesudah dan sebelum jatuhnya benteng perlawanan.

Upaya – upaya yang dilakukan Belanda dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh tahun 1904-1942 menjadi hal yang menarik dan mendorong peneliti melakukan penelitian upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh terutama setelah penandatanganan *vorte verklaring* 1903.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Perlawanan rakyat Aceh masih terus berlangsung meskipun Sultan telah menandatangani Korte verklaring pada tahun 1903.
2. Adanya usaha Belanda untuk menaklukkan Aceh secara keseluruhan memakan waktu yang cukup lama guna menyatukan negeri jajahan.
3. Ketokohan dan kharismatik seorang pemimpin serta nilai-nilai agama menjadi landasan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas upaya-upaya Belanda dalam Menghadapi Perlawanan Rakyat Aceh Pasca Perang Gayo 1904-1942 dalam rangka menyatukan negeri jajahan di Indonesia. Hal ini dilakukan peneliti agar penelitian ini tersusun sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Belanda dalam Menghadapi Perlawanan Rakyat Aceh Pasca Perang Gayo 1904 - 1942 ?

1.5 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kolonial Belanda dalam Menghadapi perlawanan rakyat Aceh tahun 1904-1942 dalam usahanya menyatukan negeri jajahannya di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan tulisan mengenai sejarah lokal Indonesia
2. Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Program studi Pendidikan Sejarah maupun di Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Penididikan Universitas Lampung.

3. Memberi informasi dan gambaran yang jelas mengenai perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda dan juga upaya – upaya Belanda dalam Menghadapi Perlawanan Rakyat Aceh Pasca Perang Gayo 1904 – 1942.

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian

a. Obyek Penelitian : Upaya Belanda Dalam Menghadapi Perlawanan Rakyat Aceh Pasca Perang Gayo 1904 - 1942.

b. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung.

c. Waktu Penelitian : Tahun 2012

d. Bidang Ilmu : Sejarah

REFERENSI

Marwati Djoened P dan Nugroho N, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 241

Ibrahim Alfian, 1987, *Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 – 1*921, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, Hlm 5

M.C. Ricklefs, 1991, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm 219

Ibrahim Alfian., *Op.Cit*., Halaman 28

Ibid., Halaman 66

Ibid., Halaman 71

Ibid., Halaman 70 - 71

Ibid., Halaman 206

Ibid., Halaman 25

Wikipedia.Organisasi/Wiki/Perang Aceh.,Febuari 2008

M.H. Gayo, 1983, *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialisasi Belanda*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 116

Ibid., Halaman 17

Ibid., Halaman 18 - 19

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Upaya Pemerintah Kolonial Belanda

Upaya pemerintah Belanda untuk menguasai Aceh membutuhkan waktu yang lama, walaupun Belanda menganggap Aceh sudah takluk tahun 1903 dengan ditandatanganinya traktat pendek (*vorte verklaring*) oleh Sultan Muhammad Daud Sjah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar" (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 85).

Menurut Susanto Tirtoprojo (1982 : 7), perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Sementara itu, Kansil dan Julianto, membedakan antara perjuangan dan pergerakan. Pergerakan mempunyai arti yang khas, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang teratur (Kansil dan Julianto,1988:15). Hal ini dapat disimpulkan jika perjuangan masih menggunakan cara-cara tradisional, belum adanya organisasi yang teratur sebagaimana yang dilakukan dalam pergerakan.

Menyerahnya Sultan pada tahun 1903 dengan ditandatanganinya *vorte verklaring* dapat saja memperlemah dan semakin membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menjalankan kolonialismenya dan menanamkan kekuasaannya diseluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Pemerintah Belanda menggunakan *vorte verklaring* ini sebagai senjata untuk menaklukkan seluruh daerah Aceh. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk dapat menguasai Aceh diantaranya menggunakan memisahkan ulama dari rakyat, menggunakan tenaga para uleebalang dan juga cara-cara simpatik seperti pembangunan-pembangunan ekonomi serta pembangunan sarana-sarana fisik untuk pendidikan.

Penaklukan perlawanan rakyat Aceh dalam Perang Gayo Alas menggambarkan bagaimana Pemerintah Kolonial Belanda telah melampiaskan nafsunya untuk membunuh dan membinasakan penduduk Aceh baik itu laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Meskipun politik tangan besi Pemerintah Kolonial Belanda ini dikenal sangat kejam dalam menindak rakyat Aceh, namun tidak dapat mematahkan perlawanan rakyat Aceh, bahkan rakyat Aceh terus berjuang melawan sampai Belanda meninggalkan bumi Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, konteks upaya dalam penelitian ini adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Dalam hal ini, segala usaha pemerintah kolonial Belanda baik itu yang bersifat persuasif ataupun yang refresif guna menaklukkan perlawanan rakyat Aceh.

2.1.2 Konsep Perlawanan

Perlawanan adalah gambaran jiwa yang mau merdeka menurut caranya sendiri-sendiri atau proses sosial dari kaum yang tertindas (L.M. Sitorus, 1987:68). Sementara itu menurut Abdulgani pengertian perlawanan adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, kebebasan dari segala tekanan yang dihadapinya (Ruslan Abdulgani, 1988 : 4).

Perlawanan-perlawanan dari rakyat Aceh yang begitu bersemangat membuat Pemerintah Kolonial Belanda berpikir untuk mencari cara atau siasat lain untuk mematahkan perlawanan-perlawanan tersebut.

Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme asing memang begitu panjang dan heroik. Perlawanan yang dilakukan banyak diilhami oleh nilai-nilai agama Islam yang begitu melekat sehingga kolonial asing begitu sulit untuk menaklukkan Aceh. Sejak Islam masuk ke Aceh melalui ujung Barat Sumatera, dikenal adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Peureulak.

Perlawanan terhadap kolonial Belanda oleh para gerilyawan Aceh mendapat dorongan spiritual dari kelompok ulama yang ada dalam masyarakat. Para ulama mengobarkan semangat Perang Sabil. Penyerangan ke pihak Belanda semakin meningkat, ketika pihak ulama yang memiliki karisma di masyarakat menyatakan bahwa perang melawan Belanda adalah berupa perang suci (Perang Sabil) untuk mengusir penjajah yang merupakan kewajiban bagi masyarakat.

“semangat perang sabillah yang telah membakar semangat rakyat Gayo dan Alas dan rakyat Aceh seluruhnya untuk maju berperang melawan bangsa Belanda yang berkulit putih yang beragama Nasrani. Semangat-semangat sabil itulah yang

menjadi “mitos” yang telah mengobarkan semangat untuk rela mengorbankan jiwa raganya melawan serbuan kaum kolonialis belanda yang jahat”(M.H. Gayo, 1983:249).

Perang Aceh dianggap perang suci oleh rakyat Aceh maupun rakyat Gayo dan Alas, karena perang tersebut membela kemerdekaan tanah air dan kesucian agama Islam terhadap serbuan Belanda yang datang menjajah. Rakyat Aceh menganggap perang melawan serbuan Belanda ini adalah “perang *fisabilillah*” perang karena Allah, perang di jalan Allah. Orang-orang Islam yang mati dalam perang sabil menurut ajaran Islam adalah mati syahid, mati sebagai pahlawan Islam yang akan mendapat pahala surga. Dalam Surat Ali Imran 169 Allah berfirman: “jangan engkau mengatakan bagi orang yang berperang di jalan Allah itu sudah mati. Mereka itu hidup, mereka mendapat rezeki dan pahala di sisi Tuhan.

Keyakinan inilah yang dipupuk oleh para ulama Islam di Aceh, Gayo, Alas dan di seluruh daerah Aceh, sehingga tumbuh dengan subur sehingga membangkitkan semangat berperang yang menyala-nyala. Semangat perang sabil ini pulalah yang menyebabkan peperangan telah berlangsung dengan hebat dan berlangsung lama hingga berpuluh-puluh tahun, dan tidak pernah takluk.

Sesuai dengan topik yang diteliti maka perlawanan yang dimaksud adalah suatu perjuangan atau usaha dari jiwa seseorang atau sekelompok orang/masyarakat yang ingin melepaskan diri dari berbagai tekanan yang dihadapinya.Dalam hal ini, perlawananperlawanan yang terjadi diberbagai daerah di Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda dilakukan untuk mempertahankan daerahnya dari jajahan Belanda

2.2 Kerangka Pikir

Ditandatanganinya traktat pendek (*vorte verklaring*) pada tahun 1903, maka secara resmi Belanda berhasil menaklukan Sultan Aceh yang berdampak pada melemahnya perlawanan rakyat Aceh dan juga membuka peluang Belanda untuk menanamkan kekuasaannya diseluruh wilayah Aceh. Keinginan keras Belanda untuk menguasai Aceh mengharuskan Belanda menghadapi perlawanan yang begitu hebat dai rakyat Aceh dan membuat pemerintah Belanda berpikir keras untuk menggunakan strategi apa yang baik dan tepat.

Van Heutsz selaku Gubernur Militer di Aceh sangat berusaha sekali untuk mematahkan perlawan-perlawanan rakyat Aceh, untuk itu dia membentuk pasukan morsose yang orang-orangnya berasal dari Jawa, Maluku dan Sulawesi. Tapi Van Heutsz ternyata harus melaksanakan nasihat lain dari Snouck, yang kemudian beranggapan pelumpuhan perlawanan dengan kekerasan akan melahirkan implikasi yang tambah sulit diredam. Hal ini dapat dilihat, setelah usaha penaklukan Belanda terhadap daerah Gayo mengalami kesulitan dan korban yang begitu banyak, teryata perlawanan-perlawanan rakyat Aceh masih terus berlangsung.

Akhirnya taktik militer Snouck Hurgronje memang diubah. Memang pada 1903, kesultanan Aceh takluk. Tapi persoalan Aceh tetap tak selesai. sehingga Snouck terpaksa membalikkan metode, dengan mengusulkan agar di Aceh diterapkan kebijakan praktis yang dapat mendorong hilangnya rasa benci masyarakat Aceh karena tindakan penaklukkan secara bersenjata. Inilah yang menyebabkan sejarah panjang ambivalensi dialami dalam menyelesaikan Aceh. Snouck pula yang

menyatakan bahwa takluknya kesultanan Aceh, bukan berarti seluruh Aceh takluk.

Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christiaan Snouck Hurgronje. Usulan strategi Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda Johannes Benedictus van Heutsz adalah, supaya para pemimpin yang berpengaruh dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh.

Perlawanan terhadap kolonial Belanda oleh para gerilyawan Aceh mendapat amunisi spiritual dari kelompok ulama yang ada dalam masyarakat. Penyerangan ke pihak Belanda semakin meningkat, ketika pihak ulama yang memiliki karisma di masyarakat menyatakan bahwa perang melawan Belanda adalah berupa perang suci untuk mengusir penjajah yang merupakan kewajiban bagi masyarakat.

Ada banyak kelemahan yang menyebabkan perjuangan rakyat Aceh mendapat halangan yaitu terjadi peperangan antara daerah Aceh sendiri, antara mereka yang bersikap memihak Belanda dengan mereka yang menentang Belanda, antara ulama dan para *uleebalang*. Disamping itu, tidak semua daerah di Aceh melakukan perlawanan kepada Belanda, ada juga daerah yang cenderung memihak kepada Belanda, misalnya daerah-daerah yang dekat perairan pantai banyak yang memihak Belanda karena ketakutan akan blokade-blokade

perdagangan yang akan dilakukan oleh Belanda. Banyak juga daerah di sebagian Aceh utara atau Aceh timur yang mengadakan perjanjian-perjanjian damai dengan Belanda dan mengakui kekuasaan dari Pemerintah Belanda, tetapi Belanda tahu mereka yang megadakan perjanjian tersebut tidak sepenuhnya mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda dan sepenuhnya tunduk kepada Belanda.

2.3 Paradigma

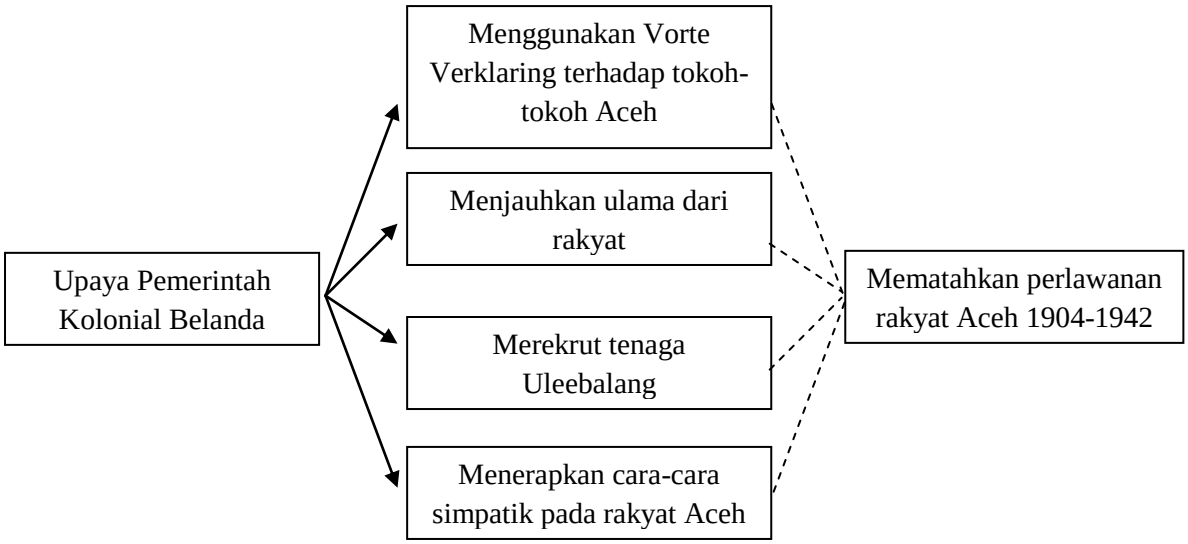

Garis Aktivitas

Garis Pengaruh

Perang Aceh yang dimulai tahun 1873 merupakan usaha pemerintah kolonial Belanda menyatukan daerah jajahannya. Perlawanan rakyat Aceh sendiri terhadap Belanda berlangsung cukup lama hingga tahun 1942. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menaklukkan perlawanan rakyat Aceh tersebut. Diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah menggunakan

vorte verklaring, menggunakan tenaga *uleebalang*, menjauhkan ulama dari rakyat dan menerapkan cara-cara simpatik kepada rakyat Aceh.

REFERENSI

W.J.S. Purwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 85

Ariyono S, 1991, *Kamus Antropologi*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 95

C.T.S. Kansil, 1985, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hal 46

L.M. Sitorus, 1987, *Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia*, Dian Jakarta, Jakarta, hal 68

M.H. Gayo, 1983, *Perang Gayo Alas Melawan Kolonial Belanda*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 119

R.A. Kern, 1994, *Hasil-hasil Penyelidikan Sebab Musabab Terjadinya Pembunuhan Aceh*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, hal 75

Rusdi Sufi, 2004, *Ragam Sejarah Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Jakarta, hal 10

Adnan Hasanuddin Yusuf, 2006, *Politik dan Tamadun Aceh*, Pusat Dokumentasi

dan Informasi Aceh, Banda Aceh, hal 87

Teuku Syamsuddin, 2000, *Sayam Itu Langkah Terakhir Setelah Dialog*, Kontras No.95 Tahun II 25 Juli – 2 Agustus 2000

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang Digunakan

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa metode yang digunakan seperti metode deskriptif, metode historis dan metode eksplorasi. Dalam penelitian ini digunakan metode historis. Berkenaan dengan metode historis, Nugroho Notosusanto memberikan penjelasan singkat, bahwa metode historis adalah :

"sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis" (Nugroho Notosusanto, hal 10).

Sedangkan menurut Louis Gottschalk, metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dari masa lalu (Gottschalk, 1986 : 32). Dalam

penelitian historis, validitas dan realibilitas hasil yang dicapai sangat ditentukan oleh sifat data yang ditentukan pula oleh sumber datanya (Hadari Nawawi, 1993 : 79).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud metode historis adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dalam mengarahkan sejarawan pada proses penelitian sejarah. Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah adalah sebagai berikut :

a. *Heuristik*, yaitu proses mencari, menemukan dan menghimpun jejak-jejak masa lampau.
b. *Kritik*, yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu asli atau tidak
c. *Interpretas*i, yakni menentukan makna yang paling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh
d. *Histiograf*i, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah

Sebagaimana menjadi kaidah umum dalam sebuah alur metode penelitian yang baik, maka tehapan-tahapan tersebut diimplementasikan pada langkah-langkah konkrit penelitian.

3.1.1 Heuristik

Pada tahap ini yaitu heuristik, cara yang ditempuh untuk menemukan sumber-sumber tentang perlawanan rakyat Aceh dan upaya Belanda dalam Menghadapi perlawanan rakyat Aceh Pasca Perang Gayo 1904-1942 adalah mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi, antara lain Perpustakan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, toko-toko buku dan beberapa situs website di internet.

Dalam melakukan tahapan ini, tentunya Peneliti memerlukan waktu yang tidak sebentar dan kesulitan-kesulitan lain yang belum diketahui bentuknya. Untuk itu kegiatan banyak dilakukan di perpustakaan. Untuk buku-buku ataupun arsip yang tidak bisa dibawa yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian ini, sumber-sumber itu tetap dicatat ataupun difotocopy dan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

3.1.2 Kritik

Setelah sumber-sumber itu ditemukan, maka sumber-sumber itu diuji dengan kritik sejarah, yaitu metode untuk menilai sumber-sumber yang kita butuhkan guna mengadakan penelitian sejarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sumber-sumber itu asli atau tidak dan sesuai dengan yang diinginkan, tujuannya adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Sumber-sumber yang telah didapat dianggap asli, karena dalam sumber-sumber itu merupakan tulisan langsung orang yang menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut.

3.1.3 Interpretasi

Tahap selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran. Setelah diperoleh data-data yang cukup tentang perlawanan rakyat Aceh dan upaya Pemerintah Kolonial Belanda mematahkan perlawanan rakyat Aceh setelah Perang Gayo 1904-1905, maka data-data tersebut akan diberi penafsiran dan dirangkai menjadi suatu keseluruhan yang masuk akal. Dalam hal ini dibutuhkan seleksi, dimana tidak semua data dapat dimasukan dalam penulisan ini namun dipilih yang sesuai dengan obyek penelitian.

3.1.4 Histiografi

Setelah memulai dengan menentukan apa yang hendak diteliti, mencari sumber-sumbernya, menilai sumber-sumber itu dan memberikan penafsiran, maka hasil dari langkah-langkah itu akan diintegrasikan dalam penulisan ini yang nantinya akan menjadi suatu hasil penelitian.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan misalnya : Koran, majalah, naskah, catatan-catatan dan dokumen yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 : 420). Untuk itu, peneliti akan mengunjungi perpustakaan yang ada, baik Perpustakaan Unila ataupun Perpustakaan Daerah Lampung serta took-toko buku yang ada. Hal ini diharapkan agar dapat menemukan bahan-bahan yang diperlukan bagi penelitian ini.

Selain dengan cara-cara tersebut, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan fasilitas internet. Pertimbangan utamanya karena internet merupakan jaringan dunia maya yang sangat luas dan lintas batas. Hal ini memungkinkan sekali untuk dapat digunakan guna mengakses data-data penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan diperoleh, maka selanjutnya diadakan pengolahan data. Menurut Sumadi Suryabrata pengolahan data merupakan suatu

langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, data yang terkumpul baru diolah untuk disajikan (Sumadi Suryabrata, 1983 : 93). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat. Sehingga pengolahan data yang dilakukan adalah non statistik, yaitu pengolahan data yang tidak menggunakan statistik, melaikan dengan analisa kualitatif.

3.4 Teknik Analisis Data

Sehubungan dengan data-data kualitatif yang dikumpulkan, maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini digunakan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus. Pada penulisan ini, data disajikan secara deskriftif. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai perlawanan rakyat Aceh dan upaya Pemerintah Kolonial Belanda mematahkan perlawanan rakyat Aceh.

REFERENSI

Nugroho Notosusanto, 1984, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (SuatuPengalaman)*, PT. Inti Indayu Press, hal 10

Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 32

Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hal 79

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, CV.Rajawali, Jakarta, hal 93

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Aceh

Propinsi Aceh terletak diujung bagian utara pulau Sumatera sehingga merupakan propinsi paling barat di Indonesia. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudera Hindia disebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur dan samudera Indonesia di sebelah selatan (Soemargono, K, 1992 : 4)

Aceh adalah salah salah satu dari tiga puluh tiga propinsi dalam administrasi pemerintah Republik Indonesia. Luas seluruh daerah beserta dengan pulau-pulau yang termasuk wilayahnya adalah 55.390 km. Sejak tahun 1999, Nanggroe Aceh Darussalam telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten, diantaranya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Aceh dikenal sebagai salah satu propinsi yang kaya akan sumber alamnya di Indonesia. Di pandang dari segi geografis, kedudukan Aceh sangat strategis, karena terletak di jalur lalu lintas pelayaran internasional, yaitu di Selat Malaka dan merupakan pintu gerbang yang menghubungkan laut Pasifik dan laut Hindia. Kedudukan Selat Malaka makin bertambah penting setelah Terusan Suez dibuka.

Oleh karena kedudukan Aceh yang penting dan berperan dalam dunia perdagangan, maka Belanda yang telah lama berkuasa dibagian lain di tanah air merasa tidak puas sebelum Aceh dapat dikuasainya. Sebab bila Aceh masih bebas merdeka, berarti ada kerajaan yang selalu mengancam kekuasaannya di negeri ini. Itulah sebabnya, maka Belanda dengan segala daya berupaya untuk menaklukkan Aceh demi terjaminnya penjajahan mereka di Indonesia (H.M. Thamrin Z, 2004 : 48).

4.1.2 Lintasan Sejarah Aceh

Sejarah Aceh dimulai sejak Islam singgah di ujung Barat Sumatera. Saat itu dikenal adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Peurleulak (840 M/1225 H), Kerajaan Islam Samudera Pasai (560 H/ 1166 M), kemudian oleh Sultan Alauddin Johansyah Aceh disatukan menjadi kerajaan Aceh Darussalam dengan Ibukota Bandar Aceh Darussalam yang bergelar Kutaraja (Syarifuddin Tippe, 2000 : 1)

Kerajaan Aceh Darussalam inilah yang memperluas penaklukkannya ke negeri-negeri Melayu sampai ke Semenanjung Malaka yang pada abad ke-15 M, Aceh menjadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Pada masa jayanya Aceh sudah menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara tetangga, Timur-Tengah dan Eropa. Antara lain dengan Kerajaan Demak, Kerajaan Pattani, Kerajaan Turki Utsmani, Inggris, Belanda dan Amerika (Ali Hasjmy, 1997 : 114).

Kesultanan Aceh mencapai puncak kemegahannya pada abad ke-16, perdagangan maju dengan pesat, hubungan intemasional telah dilakukan dengan berbagai

bangsa di dunia seperti Inggris, Spanyol, Denmark, Mesir, Arab, Persia, Italia, dan Turki; begitu pula dengan kekuasaannya di sebagian Pulau Sumatra bahkan sampai ke Semenanjung Malaya. Namun setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636, kebesaran Kesultanan Aceh pun sedikit demi sedikit menurun. Daerah kekuasaannya satu per satu melepaskan diri, seperti beberapa negeri di Minangkabau, Jambi, dan Indragiri.

> "Menjelang Perang Aceh (1873), wilayah Kesultanan Aceh adalah (1) Aceh Besar, terbagi atas tiga wilayah yang disebut *sagi* yaitu *Mukim XXII*, *Mukim XXV*, dan *Mukim XXVI* ditambah dengan wilayah Lho'Nga, Leupeung, dan Lhong; (2) Daerah?daerah di luar Aceh Besar yang mempakan *taklukan b*erupa kerajaan kecil yang otonom maupun federasi, terletak di pantai barat, pantai utara, dan pantai timur dari ujung utara Pulau Sumatra; (3) Daerah Gayo dan Alas".(Ibrahim Alfian, 1987 : 39).

Namun demikian, daerah yang benar-benar berada di bawah kekuasaan sultan adalah kawasan *dalam* (kraton), Pekan Aceh, Kampung Merduati, Kampung Jawa, Kampung Pande, dan Kampung Kedah. Aceh Besar sering disebut Aceh Inti atau *Aceh Proper* karena merupakan wilayah di mana sultan berada. Daerah di luar Aceh Besar seperti Pidie tadinya terdiri dan kerajaan?kerajaan kecil sampai kemudian ditaklukkan oleh Sultan Aceh pada abad ke-16. Pidie merupakan daerah penghasil padi terbesar di Aceh. Sedangkan Aceh Barat dan Aceh Timur merupakan penghasil lada yang merupakan hasil terpenting Aceh sampai tahun 1920-an, Gayo dan Alas adalah daerah yang terletak di pedalaman Aceh yang daerahnya beriklim sejuk.

Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak meninggalnya Sultan Iskandar Tani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya

wilayah Minangkabau, Siak, Deli dan Bengkulu. Selain itu adanya perebutan kekuasaan diantara pewaris tahta kesultanan. Kesultanan Aceh juga terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Inggris dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Inggris. Pada tahun 1824, Persetujuan Inggris-Belanda ditandatangani, Inggris menyerahkan wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Inggris mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Inggris membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan dikawasan tersebut. (Semargono. K, 1992;15)

Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik. Sebuah ekspedisi yang dipimpin Mayor Jenderal Kohler dikirimkan pada tahun 1874, namun dikalahkan tentara Aceh dan Kohler pun menjadi korban keberanian tentara Aceh. Sementara itu, Menteri Perang Belanda, Wietzel, kembali menyatakan perang terbuka melawan Aceh. Belanda kali ini meminta bantuan para pemimpin adat (*uleebalang*), dintaranya Teuku Umar. Hal ini berhasil dengan ditandai peryataan Teuku Umar pada tahun 1893 menyatakan tunduk terhadap Belanda. Dengan menyatakan sumpah setia kepada gubernur Belanda dan mendapat gelar Teuku Johan Pahlawan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Belanda menggunakan jasa Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh. Snouck Hurgronje

kemudian menyarankan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan serangan terhadap para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini teryata berhasil, dimana Sultan M. Daud akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903. Meskipun demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda secara utuh, dikarenakan masih adanya perlawanan-perlawanan sengit yang dilakukan rakyat Aceh di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan rakyat Aceh pada hakikatnya tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Sikap ini terus berlanjut sampai Belanda pergi dari Nusantara.

4.1.3 Struktur Masyarakat Aceh

Dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, bahwa kerajaan Aceh Darussalam tersusun atas :

A. Gampong

Kesatuan teritorial terkecil dalam pemerintahan kerajaan di Aceh adalah *gampong* atau disebut kampung dalam bahasa Melayu, merupakan sebuah sistem pemerintahan setingkat desa yang berdiri secara otonom. Sebuah *gampong* dipimpin oleh kepala desa yang disebut *keuchik* atau *geuchik* dan dibantu oleh suatu dewan musyawarah yang disebut *tuha peut*. Keuchik berkewajiban menjaga ketertiban di gampong yang dibantu oleh teungku *meunasah* yang padai dalam masalah agama.

B. Mukim

Mukim merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat kecamatan. Sebuah *mukim* terdiri dari beberapa buah desa yang disebut gampong. *Mukim* tersebut baru muncul setelah agama Islam masuk ke Aceh. Di tiap-tiap *mukim* didirikan sebuah masjid yang dipergunakan untuk sholat Jum'at. *Mukim* dipimpin oleh *imum mukim*, yang bertindak sebagai pemimpin masjid. *Imum* bertugas menjalankan pemerintahan dan mengkordinir *keuchik-keuchik* yang termasuk dalam *mukim*nya

C. Nanggroe

Nanggroe merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat kabupaten. Dalam bahasa Melayu, *nanggroe* disebut juga kenegerian. Sebuah *nanggroe* terdiri dari *mukim-mukim*. Sebuah *nanggroe* dipimpin oleh *uleebalang* yang bergelar *teuku*

D. Sagoe

Sagoe yang dalam bahasa Melayu disebut s*agi*, merupakan suatu sistem pemerintahan yang setingkat dengan propinsi. Sebuah *sagoe* merupakan kumpulan *naggroe-nanggroe*. Sistem pemerintahan ini terdapat di Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang tergabung ke dalam tiga buah *sagi*. Oleh karenanya Aceh Besar sering disebut pula dengan nama *Aceh Lhee Sagoe* atau Aceh Tiga *Sagoe*. Ada tiga sagoe di Aceh Besar, *Sagoe* XXII *Mukim*, *Sagoe* XXV*Mukim* dan *Sagoe* XXVI *Mukim*. Tiap-tiap *sagoe* dipimpin oleh Panglima *Sagoe*. Angka Romawi dibelakang *sagoe* menunjukkan jumlah mukim yang terdapat pada masing-masing *sagoe* tersebut.

Pada abad ke-19, Aceh merupakan wilayah di mana hubungan antara masyarakat satu wilayah dengan wilayah lainnya amat lemah. Terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan antara sultan dan *uleebalang* Satu-satunya hal yang menyatukan mereka adalah Islam. Snock Hurgronje melihat Aceh disatukan oleh ketidakpedulian *(ignorance).* Aceh menurut Hurgronje sebenarnya diperintah oleh adat, tetapi kekurangtahuan masyarakatnya akan adat menjadikan adat tersebut diidentikkan dengan Islam padahal mereka mengabaikan pelaksanaan ibadah dan hukum Islam itu sendiri (James Siegel, 1969 : 68)

Sampai awal abad ke-20 terdapat tiga elite utama dalam masyarakat Aceh yaitu sultan, *uleebalang,* dan ulama. Masing-masing elite ini mempunyai karakteristik dan peranan tersendiri dalam masyarakat Aceh. Pada masa Aceh berada pada puncak kejayaannya, sultan memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa yang dapat membentuk ketentaraan yang anggotanya diambil dari daerah?daerah. Tentara-tentara ini dilatih oleh *uleebalang-uleebalang. D*engan demikian *uleebalang* pada awalnya adalah pimpinan militer. Sebelum abad ke-17 belum disebut adanya *uleebalang* yang bertindak sebagai penguasa lokal sebagaimana yang berlaku kemudian. Adapun *uleebalang* di daerah yang jarang penduduknya atau belum berpenghuni seperti di daerah Aceh Timur dan Barat, *uleebalang-uleebalangnya* berasal dari orang-orang kaya yang membuka perkebunan di daerah tersebut yang disebut *peutuha pangkai.* Pada awal abad ke-17 sultan meminta bagian dari pajak yang dikumpulkan *uleebalang* dengan imbalan suatu surat pengakuan yang dibubuhi dengan cap *sikureung* (cap sembilan) atas kedudukan mereka di suatu wilayah.

Pajak yang ditarik *uleebalang* ini secara umum disebut *wase* atau *hase* atau *adat.* *(Pusat* Dokumentasi den Informasi *Aceh).* Ada bermacam - macam *wase* antara lain : w*ase jalan* dan *wase lueng. Wase jalan* dikenakan pada mereka yang melewati *nanggro* untuk berniaga sedangkan *wase lueng* adalah pajak untuk penggunaan irigasi yang dibangun oleh *uleebalang.* Oleh *uleebalang* hasil dan *wase* ini selain diperuntukkan bagi kepentingannya sendiri, juga didistribusikan kepada bawahannya seperti *syahbandar peukan* (penanggung jawab pasar), *hariah* (wakil *syahbandarpeukan), krani* (penulis surat dalam bahasa Arab) *kadi* atau *kali* (hakim), *imeum* (imam), *banta* (wakil), dan *panglima prang* (panglima perang).

4.1.4 Kolonialisme Belanda di Aceh sampai Perang Gayo Alas

Sejak kaum kolonial menginjakkan kakinya di nusantara ini, banyak sudah timbul perang akibat ketidaksukaan rakyat setempat kepada para kolonialis. Salah satu perang yang terjadi di nusantara dan merupakan perang yang paling sengit dalam mempertahankan daerah adalah perang Aceh. Perang ini adalah manifestasi dari ketidaksukaan rakyat Aceh pada pada Belanda, yang menjadi kaum kolonial saat itu.

Ketika Belanda dan Inggris sepakat membawa masalah Aceh ke meja perundingan, dengan hasil perjanjian yang dikenal dengan Traktat London. Sejak saat itulah Belanda punya kekuasaan di Aceh, namun ia kurang leluasa karena salah satu isi dari Traktat London menyebutkan agar Belanda menghormati kedaulatan kerajaan Aceh. Maka untuk lebih leluasa lagi dalam menjalankan praktek kolonialnya Belanda mengajak Inggris ke meja perundingan sekali lagi.

Ternyata usaha Belanda itu berhasil, kemudian hasil perundingan adalah Traktat Sumatra. Dalam perjanjian itu Belanda diperbolehkan meluaskan kekuasaan di Aceh.

Maka sejak saat itulah Belanda terus gencar memperluas daerah kekuasaannya. Hal ini telah disadari oleh kerajaan Aceh, bahwa dengan ditandatanganinya Traktat Sumatra akan mengancam kedudukan kerajaan Aceh. Maka untuk itu Aceh berusaha memperkuat dirinya dengan meminta bala bantuan dari Negara negara lain. Dalam bulan Januari 1873 Sultan Aceh telah mengirimkan seorang utusan, Habib Abdurrahman, ke Turki untuk meminta bantuan apabila Belanda menggunakan kekerasan dan berusaha menundukkan Aceh (Sartono Kartodirjo, 1976 : 211). Aceh meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan Italia ketika konsul-konsul itu tiba di Singapura dengan kapal-kapalnya.

Belanda mengetahui bahwa tindakan Aceh ini sangat membayakan kedudukanya, Belanda merasa takut jika persekutuan itu akan menjadi pengahalang bagi dirinya untuk menaklukan Aceh. Untuk mengatasi hal tersebut, Belanda segera mengirim utusannya yang bernama F.N. Niuwenhuysen menghadap Sultan Aceh. Utusan ini membawa surat yang intinya meminta agar Sultan menuruti yang menjadi kehendak Belanda. Namun ternyata Sultan tidak mengindahkan utusan serta dari pihak Belanda tersebut, akibatnya Belanda memutruskan perang dengan kerajaan Aceh. Belanda mengirimkan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler dengan membawa pasukan sebesar 168 orang perwira dan 3198 serdadu, di samping itu juga pasukan angkatan laut.(*Ibid*, 212).

Ketika mendengar bahwa Belanda akan melakukan serangan atas Aceh, maka Sultan menyiapkan pasukan-pasukannya di pantai-pantai Aceh untuk melawan pasukan Belanda yang akan tiba. Bagimanapun juga Aceh harus bergantung pada dirinya sendiri setelah usahanya untuk meminta bantuan gagal. Aceh tidak mendapat bantuan apa pun selain sentimen-sentimen yang penuh ketulusan dari orang-orang Turki (yang bagaimana pun juga tidak berdaya memberikan bantuan), penolakan mentah-mentah oleh pihak Inggris, dorongan dari konsul Amerika namun penolakan oleh Washington, dan sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak Prancis (M.C. Ricklefs, 1991:220).

Pada tanggal 5 april 1873, pasukan Belanda telah mendarat di pantai Aceh, dengan itu maka tak terelakan lagi terjadinya pertempuran antara kedua pasukan tersebut. Dengan senjata yang lebih canggih Belanda berhasil memukul mundur pasukan Aceh hingga sampai pada mesjid Raya. Belanda berhasil menduduki benteng-benteng yang ada di dekat pantai Aceh, dan untuk selanjutnya digunakan sebagai tempat pasukan militer Belanda. Sebenarnya yang menjadai target utama dari penyerangan pasukan Belanda adalah Mesjid Raya, tetapi pasukan Aceh sangat gigih mempertahankannya. Pasukan Belanda akhirnya mengepung daerah di sekitar Mesjid Raya tersebut, tapi mereka mengalami kesulitan untuk masuk lebih jauh. Karena pertahan lascar Mesjid kuat, panglima Belanda Kohler memerintahkan untuk menembakkan peluru api ke arah Mesjid. Akibat serangan yang dilancarkan pasukan Belanda itu Masjid menjadi terbakar sehingga membuat pasukan Aceh menarik dari kawasan Mesjid. Pada tanggal 14 April 1873 pasukan Belanda telah merebut dan menduduki areal Mesjid raya. Waktu Kohler kemudian

memeriksa situasi mesjid yang telah direbutnya, sekonyong-konyong ia ditembak oleh seorang prajurit Aceh, sehingga ia tewas.

Ketika Aceh telah kehilangan Mesjid Raya untuk dipertahankan, maka Sultan mengumpulkan sebagian kekuatan di sekitar Istana, sedang yang lain difungsikan untuk menyerang daerah yang telah direbut oleh Belanda. Belanda berusaha untuk mendekati daerah istana dengan megadakan penyerangan ke daerah istana Aceh, usaha ini akhirnya dapat diatasi oleh tentara Aceh pada tanggal 16 April 1873 dan kemudian terjadilah pertempuran yang sengit antara keduanya, dikarenakan tidak berhasil juga mendekati daerah istana Belanda dengan terpaksa mundur lagi ke masjid.

Dalam pertempuran ini Belanda mendapat kerugian atas gigihnya perlawanan tentara Aceh, diantaranya sembilan perwira dan seratus enam belas serdadu Belanda tewas dalam pertempuran tersebut. Usaha Belanda tersebut untuk mengatasi perlawanan dari tentara Aceh berkali-kali kandas dan berkali-kali menemui jalan buntu. Dikarenakan usahanya selalu menemui jalan buntu Belanda yang juga atas persetujuan dari Pemerintah Belanda akhirnya meninggalkan pantai Aceh pada tanggal 29 April 1873. Perlawanan rakyat Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda tidak dapat dipandang remeh oleh Pemerintah Belanda, apalagi dengan kematian dari salah seorang Jenderal Belanda yaitu Jenderal Kohler merupakan suatu bukti nyata yang dapat menjadikan pemikiran bagi Pemerintah Belanda bahwa perlawanan dari masyarakat Aceh tidak dapat dianggap ringan.

Dengan kegagalan serangan yang pertama ke Aceh, tidak membuat Belanda patah arang untuk menduduki istana Aceh. Belanda mencoba dengan mengirimkan pasukannya lagi untuk menyerang Aceh, kali ini berbeda dengan serangan yang pertama akan Aceh, Belanda mengirimkan lebih banyak tentara untuk serangan kali ini. Pada tanggal 6 November 1873, Jenderal J. Van Swieten diangkat menjadi pimpinan pasukan expedisi kedua yang akan membawa pasukan yang lebih besar berkekuatan sekitar 8000 orang. Selama mengadakan persiapan untuk keperluan ini Belanda mengadakan Blokade terhadap pantai Aceh dengan menggunakan angkatan lautnya untuk menghalangi kerajaan Aceh berhubungan dengan dunia luar.

Pada tanggal 9 Desember 1873 pasukan Belanda tersebut telah mendarat di Aceh, tepatnya di daerah Kuala Lue. Kedatangan pasukan tersebut disambut dengan tembakan senapan-senapan dari para pejuang Aceh. Para pejuang Aceh tahu akan tujuan dari datangnya pasukan Belanda tersebut yaitu akan merebut istana, maka mereka segera memperkuat pertahanan istana. Berbagai bantuan datang dari berbagai daerah di Aceh untuk memperkuat barisan pertahanan di istana Aceh. Pertarungan yang tak kalah sengitnya juga terjadi di daerah masjid raya, karena Belanda juga berusaha menduduki daerah mesjid raya tetapi pasukan lebih dipusatkan di daerah istana.

Usaha rakyat Aceh untuk memepertahankan istana dari genggaman Belanda akhirnya mengalami kekalahan juga, istana akhirnya istana diduduki oleh Belanda pada tanggal 24 Januari 1874 tetapi Sultan dan juga seluruh orang-orang istana telah mengosongkan istana pada tanggal 15 Januari 1874 dan menyingkir ke

Luengbata. Akhirnya daerah tersebut dijadikan kedudukan yang baru oleh sultan, usaha dari Jenderal Van Swieten untuk menangkap sultan selalu gagal dikarenakan sultan dan para panglimanya terus bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda walaupun istana telah diduduki oleh Belanda. Suatu keadaan yang tidak disangka telah terjadi, yaitu sultan telah terserang wabah kolera sehingga meninggal pada tanggal 28 Januari 1874.

Dengan meninggalnya sultan maka beberapa panglima sagi bersepakat bahwa yang akan meneruskan kesultanan adalah putra sultan almarhum, Muhammad Daudsyah. Merasa telah menguasai istana membuat Belanda telah menguasai Aceh, oleh karenanya Jenderal Van Swieten mengeluarkan proklamasi , bahwa Aceh telah mereka kuasai pada tanggal 31 Januari 1874, tetapi adanya keberadaan dari proklamasi tersebut tidak dihiraukan oleh para pejuang Aceh yang masih dengan gigih mempertahankan daerah mereka, terbukti dengan masih adanya perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan terhadap Belanda di daerah-daerah. Belanda menyangka bahwa dengan menduduki *dalam* dan sebagian kecil daerah Aceh besar serta dengan secarik kertas proklamasi sudah cukup untuk membuat negeri Aceh yang selebihnya bertekuk lutut. Yang terjadi ialah perlawanan di Aceh semakin meningkat (Ibrahim Alfian, 1982:68).

Tidak semua daerah di Aceh melakukan perlawanan kepada Belanda, ada juga daerah yang cenderung memihak kepada Belanda, misalnya daerah Meuraksa dengan kepala di daerah tersebut Teuku Ne’ yang lebih memihak Belanda daripada mengadakan perlawanan, daerah Meuraksa adalah daerah pantai yang mungkin merasa rugi bila mengadakan perlawanan dikarenakan daerah pantai

akan merasa kesulitan jika Belanda mengadakan blokade-blokade terhadap perdagangan. Banyak juga daerah di sebagian Aceh utara atau Aceh timur yang mengadakan perjanjian-perjanjian damai dengan Belanda dan mengakui kekuasaan dari Pemerintah Belanda, tetapi Belanda tahu mereka yang megadakan perjanjian tersebut tidak sepenuhnya mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda dan sepenuhnya tunduk kepada Belanda.

Pada tanggal 20 April 1874 Jenderal Van Swieten diganti Mayor Jenderal J.L.J.H. Pel. Jenderal yang baru ini merencanakan untuk menguasai daerah-daerah Krueng Raba dan Krueng Raya dengan maksud untuk dapat membangun garis pertahanan melalui daerah sagi XXVI Mukim. Ini berguna untuk mendirikan sebuah garis pos melalui Aceh besar denagn harapan dapat memutuskan hubungan Aceh Besar dengan laut. Dengan demikian diharapkan arti politik Acehterhadap dunia luar akan lenyap, sedangkan dalam bidang perniagaan akan tergantung kepada Belanda. Selama pimpinan dipegang oleh Jenderal Pel banyak daerah di Aceh yang mulai direbut oleh Belanda diantaranya Olee lee, Nangrue, Punge Blang Cut, Lamara Uleyo, Kuta Alam, Lamara dan Lainnya. Akhirnya kubu Belanda mendapat pukulan setelah pasukan Aceh yang menyerang kubu Belanda di Tunga berhasil menembak Jenderal Pel sehingga ia tewas. Usaha Belanda selanjutnya adalah mengutamakan untuk memeperkuat lini penutup (*afsluitingslinie)* di daerah yang telah Belanda kuasai.

Ada banyak kelemahan yang menyebabkan perjuangan rakyat Aceh mendapat mendapat halangan yaitu terjadi peperangan antara daerah Aceh sendiri, antara mereka yang bersikap memihak Belanda dengan mereka yang menentang

Belanda, seperti yang terjadi antara negeri Simpang Ulim dan Tanjung Seumantok di satu pihak dan Keureutu yang memihak kepada Belanda di lain pihak.

Kedatangan Habib Abdurrahman dari Turki pada bulan Maret 1879 membuat perlawanan rakyat Aceh semakin giat. Penyerangan lebih dititik beratkan kepada penyerangan kepada benteng-benteng Belanda. Penyerangan Habib terutama bertujuan untuk mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda yang merupakan lini penutup (*afsluitingslinie*). Selain penyerangan terhadap pos-pos militer dan pencegatan terhadap konvoi pasukan Belanda, dilakukan pula perusakan terhadap bangunan-bangunan militer.

Selama kemimpinan dari Habib Abdurrahman banyak kesulitan yang ditimpa oleh Belanda dikarenakan mendapat perlawanan yang sangat sengai dari para rakyat Aceh yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman. Suatu hal yang sedikit banyak memperlemah kekuatan pihak Aceh antara lain menyerahnya Habib Abdurrahman pada tanggal 13 Oktober 1878. Menyerahnya Habib Abdurrahman kemungkinan dikarenakan markas besarnya di Montasik telah direbut oleh Belanda dan karena kekalahannya dealam pertempurannya di Longi.

Pada tahun 1884 sultan Muhammad Daudsyah telah dewasa dan dengan dukungan Mangkubumi Tuanku Hasyim dan para ulama antara lain Teungku Cik Di Tiro telah aktif melakukan tugas sebagai sultan Aceh dengan berkedudukan di Keumala. Dalam masa pemerintahan sultan ini perlawanan terhadap Belanda terus ditingkatkan, pertempuran yang menyebar di berbagai daerah di Aceh membuktikan bahwa perlawanan rakyat Aceh cukup sulit untuk ditaklukkan Belanda dalam masa yang singkat. Akhirnya Belanda menyadari bahwa

penaklukkan Aceh dengan kekuatan senjata tidak akan berhasil, Belanda berusaha mencari jalan lain yaitu dengan cara memikat pemimpin-pemimpin pejuang Aceh. Teuku Umar sendiri menyerah kepada Belanda, tetapi karena tidak puas dengan perlakuan Belanda pada dirinya, ia kemudian melakukan perlawanan kembali terhadap Belanda. Belanda berusaha pula untuk mendekati pemimpn pejuang Aceh yang lainnya diantaranya Teungku Cik Di Tiro, Panglima Polim dan lainnya. Tetapi dikarenakan sikap keras Teungku Cik Di Tiro dan keyakinannya yang kuat dalam soal agama tidak dapat dilunakkan oleh Belanda.

Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh cara lain yaitu dengan jalan mengetahui rahasia kekuatan Aceh terurtama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Dr snouck Hurgronjae yang paham tentang agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh yang naik haji di Mekkah, oleh Pemerintah Hindia Belanda dipandang sebagai seorang yang tepat untuk diberi tugas memecahkan kesulitan-kesulitan yang menyangkut masalah penaklukan Aceh. Dari tahun 1891 sampai denagn 1906 dia menjadi penasihat utama dari pemerintah Kolonial Belanda dalam masalah Islam dan masalah penduduk asli Indonesia (M.C Ricklefs, 1991:221). Dengan nama samaran Abdul Gafar ia bertempat tinggal ditegah-tengah rakyat Aceh di Peukan Aceh.

Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje dapat diketahui bahwa Sultan Aceh tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak mendapat persetujuan dari kepala-kepala bawahannya. Dengan demikian meskipun telah menundukkan sultan tidak berarti bahwa kepala-kepala bawahan dengan sendirinya akan tunduk, juga pengaruh dari

para ulama-ulama sangat kuat pada rakyat, oleh karenanya akan sulit untuk menundukkan perlawanan rakyat Aceh yang kuat akan keyakinan agama tersebut. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat diperbuat untuk meredakan perlawanan yang fanatik dari kaum ulama, jadi mereka harus ditumpas sampai habis dan pemerintah Belanda harus mengandalkan kepada *uleebalang* (yang dilihat sebagai para pemimpin adat atau 'sekuler') (*Ibid*, 221). Belanda mencari-cari kaum *uleebalang* yang mau diajak untuk bekerjasama, yang mereka anggap setaraf dengan para bupati Jawa, para pemimpin adat yang mau mengimbangi pengaruh politik Islam.

Sementara itu Panglima Polim dan Sultan tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda, meskipun tempatnya berpindah-pindah. Penculikan istri Sultan oleh Belanda, demikian pula dengan tekanan-tekanan yang semakin berat dari pasukan Belanda, menyebabkan Sultan mengambil keputusan untuk menyerah. Upacara penyerahan Sultan kepada Belanda dilakukan pada tanggal 20 Januari 1903 (Sartono Kartodirjo, 1976:223). Pemerintah Kolonial Belanda juga menggunakan siasat yang sama terhadap Panglima Polim, istri, ibu dan anak-anak Panglima Polim ditangkap oleh Belanda.

Keadaan yang mendesak ini memaksa Panglima Polim bersama pengikutnya sebanyak 150 orang menyerah pada tanggal 6 September 1903. Dengan kejadian menyerahnya para pemimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda maka perlawanan rakyat Aceh ini menjadi sangat lemah dan memudahkan Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di daerah Aceh seluruhnya . Hal ini tidak berarti bahwa penentangan terhadap Belanda telah lenyap sama sekali. Ini

dibuktikan dengan masih sering terjadinya perlawanan-perlawanan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Kolonial Belanda pada saat sesudahnya. Setelah hampir 1/5 abad berperang (1891) Belanda kehilangan 200 juta florin, 1.280 orang tewas dan 5.287 luka-luka (Ibrahim Alfian, 1987:82).

Perlawanan rakyat Aceh tidaklah berhenti, sebab hampir setiap daerah baik di pantai maupun di pedalaman, yang belum sempat dijelajah oleh pasukan Belanda, masih tetap mengkonsolidasikan diri dengan benteng-benteng pertahanan, untuk setiap saat menghadapi serangan pasukan Belanda. Para hulubalang terutama para ulama di daerah tersebut tetap tegar untuk menentang setiap bentuk kolonial, walau harus ditempuh dengan pertumpahan darah.

Daerah Gayo adalah basis pertahanan rakyat Aceh. Berdamainya sultan tidak membuat daerah Gayo tunduk kepada Belanda. Oleh karena daerah Gayo-Alas (Aceh Tengah) belum dapat dikuasai Belanda, maka maka Gubernur Militer Belanda di Aceh pada saat itu, Van Heutsz pada bulan Februari 1904, telah memerintahkan Letnan Kolonel G.C.E. Van Daalen memimpin pasukan marsose untuk menyerang Tanah Gayo dan Alas, yang letaknya di tengah-tengah pe-gunungan Aceh. Serangan pertama direncanakan ke Gayo Laut, kedua ke Gayo Linge, ketiga ke Gayo Lues dan serangan keempat ke Tanah Alas. Daerah Gayo dan Alas dapat dianggap merupakan benteng terakhir rakyat Aceh, dan daerah terakhir dalam perang terbuka yang dilancarkan oleh pasukan Belanda, dalam sejarah perang kolonial dalam usahanya untuk menjajah seluruh Aceh (M.H. Gayo. 1983:121).

Serangan pasukan Belanda ke daerah Gayo dan Alas pada tahun 1904 ini, dilancarkan setelah perang Aceh berlangsung selama 31 tahun, sejak meletusnya Perang Aceh pada tahun 1873. Vaan Heutsz ingin cepat-cepat menaklukkan daerah Gayo dan Alas, daerah yang selama ini masih utuh dikuasai oleh rakyat Aceh, agar kekuasaan Belanda benar-benar merata di Aceh, selama ia masih menjadi gubernurnya.

> “Daerah Gayo adalah basis pertahanan rakyat Aceh. Berdamainya sultan tidak membuat daerah Gayo tunduk kepada Belanda. Oleh karena daerah Gayo-Alas (Aceh Tengah), belum dapat dikuasai Belanda, maka Van Daalen ditugaskan mengadakan hubungan politik dengan raja-raja disana” (Ibrahim Alfian, 1987:209).

Pada tanggal 8 Februari 1904, pasukan marsose di bawah pimpinan Van Daalen berangkat dari Kutaraja menuju Gayo dan Alas, dengan kekuatan sepuluh brigade bersenjata lengkap, dibantu oleh 450 orang narapidana kerja-paksa. Pasukan ini merupakan pasukan 'induk' karena masih ada lagi pasukan mobile yang dipimpin oleh Kapten Creutsz Lecheitmerer dengan kekuatan 148 pasukan tentara yang bergerak dari arah timur dari Kuala Simpang (M.Said, 1991:341). Dengan demikian maka jumlah seluruh pasukan Belanda yang digunakan untuk menyerbu Gayo dan Alas tidak kurang dari 500 orang pasukan militer bersenjata lengkap, ditambah dengan kira-kira 1.000 orang tenaga kesehatan, narapidana kerja-paksa dan tukang-tukang pikul perlengkapan perang dan makanan.

Pada tanggal 12 Februari 1904 pasukan Belanda telah tiba di daerah tujuan, yaitu di daerah Gayo Laut, kira-kira 50 kilometer dari Takengon. Tetapi begitu Belanda menginjakkan kakinya di desa dekat Ketol, disambut dengan pertempuran sengit yang pertama, di mana pasukan Belanda mengalami korban, baik mati maupun luka-luka. Dalam perjalanan menuju Takengon, pasukan Belanda tidak henti-

hentinya mendapat perlawanan, Sampai mereka berhasil membuat markasnya di desa Kung, kira-kira 7 kilometer ari Takengon. Dari markas yang baru didirikan ini, pasukan Belanda melakukan operasi militer di sekitar Gayo Laut. Walau perlawanan pasukan rakyat Gayo cukup sengit, dan hampir setiap daerah yang dilalui pasukan Belanda terjadi pertempuran, tetapi akhirnya daerah Gayo Laut pun jatuh ke tangan pasukan kolonial.

Setelah pasukan Belanda berhasil menguasai daerah Gayo Laut, operasi militernya maju menuju Gayo Lues, dimana pada tanggal 9 Maret 1904, pasukannya telah mencapai daerah Kla, yaitu daerah yang merupakan pintu masuk Gayo Lues. Berbeda dengan pertempuran di Gayo Laut, di sini rakyat memperkuat pertahanannya dengan benteng-benteng yang dibangun dari tanah dicampur batu-batu. Di sekelilingnya dibuat pagar kayu berduri yang telah dibuat runcing, dan dilapisi pula dengan tanaman hidup bambu berduri, yang oleh orang Gayo disebut *'uluh kaweh'* yang berlapis-lapis. Kemudian dipasang pula bambu runcing dan kayu runcing dalam bentuk ranjau-ranjau.

Di bagian dalam benteng dibuat lobang-lobang perlindungan, lubang pengintaian lubang penembak di bagian dinding-dinding benteng. Selain itu dibuat pula lubang perlindungan untuk wanita dan anak-anak di dalam benteng tersebut. Dengan cara ini, benteng pertahanan rakyat Gayo berusaha menahan serangan pasukan Belanda yang jauh lebih kuat dan modern. Benteng-benteng semacam ini tersebar di daerah Gayo Lues dan Alas, serta tidak kurang dari sepuluh benteng yang besar dan kokoh yang dipertahankan mati-matian oleh rakyat Gayo, dalam pertempurannya dengan pasukan Belanda.

Salah satu bukti tentang pertempuran benteng yang dahsyat, yaitu benteng Gemuyang, setelah berhari-hari bertempur, akhirnya baru jatuh setelah rakyat Gayo sebanyak 308 orang tewas : antaranya 168 orang laki-laki, 92 orang wanita dan 48 orang anak-anak. Sedangkan yang luka-luka sebanyak 47 orang: antaranya seorang pria, 26 orang wanita dan 20 orang anak-anak. Hanya 12 orang yang tertangkap hidup-hidup, dimana 3 orang wanita dan 9 orang anak-anak. Sedangkan korban dari pihak pasukan Belanda hanya dua orang tewas dan 15 orang luka-luka berat (M.H. Gayo. 1983:143).

Pertempuran di benteng Rikit Gaib antara pasukan penyerbu dengan pasukan rakyat Gayo lebih berimbang, sehingga korban yang jatuh di kedua belah pihak cukup banyak. Di pihak rakyat Gayo telah meninggal dunia sebanyak 148 orang: antaranya 143 orang pria, 41 orang wanita dan anak-anak, hanya seorang laki-laki dan dua orang wanita yang tertangkap hidup-hidup oleh Belanda. Korban di pihak pasukan Belanda: 7 orang mati, diantaranya 2 orang perwira dan 42 orang luka--luka berat, diantaranya 15 orang perwira (M.H. Gayo. 1983:165).

Pertempuran dari benteng ke benteng yang tersebar di daerah-daerat Gayo tidak kurang dari sepuluh buah banyaknya, dengan korban ribuan rakyat Gayo yang mati terbunuh. Hanya dengan cara itu pasukan Belanda dapat menaklukkan Gayo, sehingga pada tanggal 2 Juni 1904, Van Daalen berhasil mengumpulkan penghulu-penghulu Gayo sebanyak dua belas orang untuk memaksa mereka takluk kepada penguasa kolonial Belanda (M.H. Gayo. 1983:190).

Setelah daerah Gayo berhasil ditundukkan, maka pada tanggal 13 Juni 1904 pasukan Belanda melanjutkan serangan ke daerah Alas, dengan sasaran utamanya desa Batu Mbulen dimana tinggal seorang ulama besar bernama Teungku Haji Telege Makar dengan pondok pesantrennya. Mendengar kedatangan pasukan Belanda mau menyerbu kaum muslimin, dengan pimpinan para ulama mereka mengosongkan desa tersebut dan semuanya berkumpul di benteng Kute Reh yang telah disiapkan jauh sebelum pasukan musuh datang.

Pertempuran dahsyat dan bermandikan darah berlangsung berhari-hari antara pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin di benteng Kute Reh tersebut. Benteng Kute Reh jatuh ke tangan pasukan Belanda, setelah 561 orang pasukan yang mempertahankan benteng itu tewas, diantaranya 313 orang pria, 189 orang wanita, dan 59 orang anak-anak. Yang luka-luka sebanyak 51 orang, antaranya 25 orang wanita dan 31 orang anak-anak, yang tertangkap hidup-hidup dua orang wanita dan 61 orang anak-anak. Sedangkan di pihak musuh hanya dua orang mati dan 17 orang luka-luka berat (M.H. Gayo. 1983:204-205).

Pada tanggal 20 Juni 1904 pasukan Belanda dibawah pimpinan Van Daalen sendiri melanjutkan penyerbuannya ke benteng Likat. Pertempuran sengit bermandikan darah berlangsung dahsyat dan sadis. Sebab pasukan Belanda membunuh siapapun tanpa pandang bulu, sehingga 432 orang mati terbunuh, diantaranya 220 pria, 124 wanita, dan 88 orang anak-anak. Yang luka-luka berat dan ringan sebanyak 51 orang, diantaranya 2 orang pria, 17 orang wanita dan 32 orang anak-anak, yang tertangkap hidup-hidup hanya anak-anak sebanyak 7 orang. Dipihak pasukan musuh yang mati hanya seorang dan 18 orang tentara

luka-luka, termasuk Letnan Kolonel Van Daalen dan Kapten Watrin (M.H. Gayo. 1983:208)..

Daerah Alas dapat dikuasai pasukan Belanda setelah jatuhnya benteng Lengat Baru pada tanggal 24 Juli 1904, dengan korban yang sangat besar di pihak rakyat Alas, di mana 654 orang tewas, diantaranya 338 orang pria dan 186 wanita serta anak-anak 130 orang. Sedangkan yang luka-luka seorang pria, 16 orang wanita dan 32 orang anak anak. Di pihak musuh hanya 4 orang mati dan 28 orang luka-luka (M.H. Gayo. 212-214).

Sebagaimana telah terjadi di daerah-daerah lainnya di Aceh, jika pertempuran terbuka telah tidak mungkin dilakukan, karena kekuatan yang tak seimbang dengan pasukan musuh, maka 'perang gerilya' merupakan satu-satunya jawaban untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Di Gayo dan Alas pun berlaku hal yang sama. Apalagi daerah Gayo dan Alas adalah daerah bergunung-gunung dan berhutan lebat, sehingga 'perang gerilya' yang dilakukan rakyat Gayo dan Alas sangat menguntungkan. Dan sebaliknya pasukan Belanda tidak pernah bisa tinggal tenteram di daerah-daerah yang didudukinya, karena mendapat serangan gerilya.

Walaupun perang kontra gerilya dengan pasukan marsose yang dianggap berani dan kejam, sebagaimana digariskan oleh Van Heutsz, dinilai berhasil dengan gemilang, tetapi tidak berarti pasukan gerilya muslimin Aceh dianggap pengecut dan senantiasa kalah. Bahkan terkadang pasukan gerilya muslimin Aceh jauh lebih berani dan lebih lincah dari pasukan marsose yang paling dibanggakan. Hal ini terbukti dari pengalaman salah seorang komandan marsose yang paling

terkenal, Kapten M.J.J.B.H. Campion, yang pada tahun 1904 di daerah Meulaboh di pantai barat, dengan kekuatan setengah divisi melakukan penyerbuan terhadap pasukan gerilya Teuku Keumangan dan kakaknya, Teuku Johan.

Pada bulan Maret 1904 sebuah kolonne yang terdiri dari enam brigade marsose, yaitu kira-kira 160 orang tentara, masuk ke dalam jebakan pasukan gerilya muslimin yang berkekuatan sebanyak 300 orang gerilyawan. Dengan gerak cepat dan ketangkasan yang luar biasa, pasukan gerilyawan muslimin Aceh ini menyerang dengan kelewang dan rencong terhadap pasukan marsose yang terjebak itu. Seluruh pasukan Belanda sebanyak 160 orang tentara mati terbunuh, termasuk Kapten Campion yang mati karena luka-luka berat.

Pasukan gerilyawan muslimin Aceh masih terus efektif melakukan serangan-serangan terhadap pasukan Belanda di daerah-daerah seperti Lhong, dimana pada tahun 1925 dan tahun 1926 dan kemudian pada tahun 1953 telah berkembang menjadi 'perang terbuka'. Untuk mengatasi kekuatan gerilyawan muslimin Aceh ini, pemerintah kolonial Belanda mengumpulkan kembali bekas-bekas pasukan marsose dari seluruh Hindia Belanda. Operasi-operasi pasukan marsose di sungai atau di darat seringkali terjebak oleh pasukan gerilyawan muslimin, sehingga dapat dihancurkan secara total. Bahkan tempat-tempat rahasia pasukan marsose sering diserang dan dibakar oleh pasukan gerilyawan.

Idola gerilyawan muslimin Aceh terlukiskan dalam person tokoh ulama Aceh Teungku di Tiro Syeikh Saman. Ia mempunyai lima orang putera, yang tertua bernama Muhammad Amin, yang gugur pada pertempuran dengan pasukan

Belanda pada tahun 1896. Empat orang putera lainnya dan dua orang cucu semuanya gugur sebagai syuhada pada pertempuran antara tahun 1904 dan 1911 Pada bulan Desember 1909, Letnan B.J. Schmidt mendapat perintah untuk menyerang pasukan gerilyawan muslimin Tiro di daerah Tangse. Menurut taksiran, kekuatan pasukan gerilyawan muslimin Tiro ini berjumlah 250 orang. Dengan menggunakan dua brigade pasukan marsose, Schmidt secara sistimatis menyerang dan menangkap pasukan gerilyawan muslimin Tiro, di mana pada tahun 1909 dan 1911 dapat dikatakan hampir seluruhnya tertangkap.

Keberhasilan pasukan Belanda dalam menumpas pasukan gerilyawan muslimin Tiro ini karena pengkhianatan orang-orang Aceh sendiri, yaitu para kaum bangsawan yang menjadi kolaborator Belanda. Tetapi tidak seorang pun dari pimpinan gerilyawan muslimin Tiro ini yang menyerah hidup-hidup. Akhirnya keturunan Syeikh Saman, tokoh gerilyawan muslimin Tiro, tinggal seorang lagi, seorang pemuda remaja yang terus bergerilya menyerang pasukan Belanda kafir. Letnan Schmidt meminta bantuan tokoh-tokoh Aceh untuk bisa membujuk tokoh pemuda-remaja gerilyawan muslimin Tiro ini supaya menyerah dengan jaminan oleh Gubernur Jenderal tidak akan dijatuhi hukuman. Hasilnya, tidak mungkin menyerah. Hidup mulia atau mati syahid itulah semboyan gerilyawan muslimin Tiro.

Pada bulan Desember 1911, perwira Marsose dengan pasukannya bernama Nussy menyerang tempat persembunyian gerilyawan muslimin Tiro yang terakhir, yang tinggal tiga orang saja lagi. Dalam serangan ini, dua orang dari tiga gerilyawan muslimin Tiro ini tewas menjadi syuhada, dan ternyata yang seorang itu bernama

Cit Ma'az (Ma'at), adalah keturunan terakhir dari Syeikh Saman, tokoh utama perang Aceh. Dengan wafatnya Cit Ma'az, yang baru berusia lima belas tahun, maka berarti tiga generasi Teuku di Tiro di abadikan di dalam Perang Aceh.

Perang gerilya yang berkepanjangan tidak hanya dilakukan oleh gerilyawan muslimin Tiro, tetapi juga dilakukan oleh pasukan gerilyawan Teuku di Mata Ie, Teungku di Barat dan Pang Naggru di daerah-daerah sekitar Lhok Seumawe dan Lhok Sukon. Daerah medannya yang berubah-ubah dari gunung-gunung sampai ke laut, sangat memungkinkan pasukan gerilyawan muslimin ini dapat melakukgn gerakan yang sulit untuk diketahui dan dikejar oleh pasukan Belanda. Pasukan gerilyawan dibawah pimpinan Pang Nanggru , masih aktif sampai tahun 1910, pasukan gerilyawan Teungku di Barat aktif sampai tahun 1912. Sedangkan pasukan gerilyawan Teungku di Mata Ie masih terus aktif sampai tahun 1913, dan wafat pada tahun 1917 karena luka-luka kena peluru.

Perang Aceh tidaklah berakhir pada tahun 1913 atau 1914. Dari tahun 1914 terentang benang merah sampai tahun 1942, alur perlawanan di bawah tanah. Perang gerilya, yang pada tahun 1925, tahun 1926, sampai tahun 1933 berkembang menjadi perlawanan terbuka lagi. Perang Aceh yang melanda hampir setiap daerah Aceh, dari mulai pantai sampai ke puncak- puncak gunung, dengan pertempuran tanpa henti dan lelah, adalah bentuk perang yang spesifik bagi Aceh. Keberanian, pengorbanan dan daya tahan yang mengagumkan bagi setiap orang yang mempelajari sejarah Perang Aceh, adalah berkat keyakinan yang kokoh terhadap ajaran Islam, yang telah dimiliki sejak kelahiran Kesultanan Aceh pada tahun 1507.

4.1.5 Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial di Aceh Tahun 1904 – 1942

4.1.5.1 Kondisi Politik di Aceh Tahun 1904 – 1942

Bentuk pemerintahan yang didirikan Belanda di Aceh mencerminkan strategi yang dilakukan oleh Belanda yaitu mempertentangkan para *uleebalang* dengan rakyat. Dalam hal ini, bentuk pemerintahan yang diberlakukan di Aceh didasarkan pada sistem pemerintahan langsung dan tidak langsung. Pemerintahan langsung dilaksanakan di wilayah-wilayah yang kemudian dikenal sebagai kabupaten Aceh Besar, Kewedanaan Singkel dan sebagian besar kota-kota didaerah pesisir yaitu Sigli, Bireuen, Lhoksmawe, Langsa, Kuala Simpang dan Tapaktuan. Sementara wilayah yang berada diluar tempat-tempat tersebut secara tidak langsung diperintah Belanda melalui para *uleebalang* setempat.

Sistem pemerintahan tidak langsung ini merupakan pengakuan Belanda terhadap para *uleebalang* sebagai pemimpin yang berpemerintahan sendiri diwilayah mereka masing-masing. Namun pemerintahan tidak langsung itu, tidak saja menjadikan para *uleebalang* sebagi penyangga antara Belanda dengan rakyat Aceh, melainkan juga sebagai musuh rakyat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan, para *uleebalang* diharuskan oleh Belanda memperlakukan musuh kaum kolonial sebagai musuh mereka sendiri.

> “pemerintah Belanda mengangkat orang-orang kepercayaannya ditiap-tiap daerah seorang *uleebalang* atau *zelfbestuuder* yang memerintah dalam satu landschap Belanda menggunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan tersebut diserahkan pada para *uleebalang-uleebalang* di tiap-tiap daerah kekuasaannya masing-masing”. (Al-Chaidar, 1999 : 80).

Belanda mempertahankan tatanan pemerintahan adat di Aceh, dengan tetap menyebut *uleebalang* sebagai Kepala pemerintahan atau Pemangku Adat di darahnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Belanda menambah *uleebalang* untuk menempati daerah-daerahnya yang masih kosong.

4.1.5.2 Kondisi Ekonomi di Aceh Tahun 1904 - 1942

Ketika Belanda menguasai Aceh, seluruh kegiatan ekonomi Aceh diambil alih oleh Belanda. Hal ini dilakukan dengan memajukan ekonomi dan diupayakan pada tahun 1901. Pada waktu itu Van Heutz (selaku Gubernur Sipil dan Militer di Aceh) membuat peta tentang daerah Aceh. Beberapa tempat yang dianggap potensial di wilayah Aceh mulai dieksploitasi. Perkebunan-perkebunan swasta atau pemerintah dan pertambangan-pertambangan mulai dibuka. Prasarana-prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan-jembatan dan pelabuhan-pelabuhan serta irigasi-irigasi mulai dibangun.

Sebelum perlawanan militer dapat dihentikan, Belanda telah menyelesaikan pembangunan jalan raya di sepanjang pantai Timur dan Barat. Pada tahun 1914, pemerintah Belanda telah menyelesaikan sebuah jalan raya yang menghubungkan Bireuen dengan Takengon. Antara tahun 1915 – 1918 pembuatan jalan di Aceh terus mengalami peningkatan, jalan-jalan yang telah ada diperbaiki dan diperpanjang (Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2004 : 157). Selain itu juga, Belanda juga membangun jaringan jalan kereta api dari Kutaraja sampai ke perbatasan Aceh-Sumatera Timur. Pembangunan rel kereta api ini digunakan sebagai alat angkutan militer.

Usaha pertanian, khususnya bersawah merupakan mata pencaharian pokok rakyat Aceh. Akibat keadaan politik, dimana terjadi peperangan yang terus menerus, maka usaha pertanian rakyat mengalami kemunduran. Pemerintah Belanda berusaha untuk menggalakkan dan meningkatkan hasil produksi pertanian rakyat. Pemerintah Belanda menempuh beberapa cara, diantaranya dengan memberikan bantuan modal kepada rakyat dan *uleebalang* yang tidak lagi melawan Belanda. Pemerintah Belanda juga mendirikan bank diwilayah Aceh Besar yang diberi nama *de Groot Atjhsche Afdeeling bank*. Rakyat yang menginginkan bantuan kredit untuk membuka kembali atau memperluas kebun-kebun dan sawah-sawah mereka dapat meminjam modal dari bank tersebut, tanpa dikenakan bunga. Selain itu, pemerintah Belanda memperkenalkan varietas bibit yang baik untuk daerah Aceh, membangun irigasi-irigasi modern dan membentuk badan yang bertugas memberikan penyuluhan pertanian.

4.1.5.3 Kondisi Sosial di Aceh Tahun 1904 – 1942

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat kepada rakyat Aceh. Melalui cara ini diharapkan rakyat Aceh tidak lagi terpengaruh dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh para ulama. Sejak tahun 1900, beberapa putera *uleebalang* telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sekolah Belanda di Kutaraja.

Pada tahun 1911, pemerintah kolonial Belanda mendirikan 125 sekolah di Aceh dengan keseluruhan murid mencapai 6.000 orang. Dalam jenjang pendidikan dasar, di Aceh terdapat delapan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) dan sekolah kerajinan tangan. Disamping itu, masih terdapat empat ELS (*Europeesche Lagere*

School) yaitu sebuah pendidikan dasar yang dikhususkan untuk anak-anak eropa, sedangkan pada tingakat menengah hanya terdapat sebuah saja, yakni MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) (Nazaruddin Sjamsuddin, 1999 : 25).

Meskipun jumlah anak-anak Aceh yang mengenyam pendidikan meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi pertumbuhan kelompok cendikiawannya berlangsung secara lambat, akibatnya Belanda terpaksa mendatangkan tenaga guru yang diperlukan dari luar Aceh. Kebanyakan kaum terdidik ini adalah anak-anak para bangsawan atau kerabat orang-orang biasa yang dekat dengan mereka.

Terbatasnya pertumbuhan kaum cendikiawan ini tentu saja disebabkan oleh pembatasan-pembatasan yang diterapkan Belanda dalam bidang pendidikan. Di Aceh, ciri utama sistem pendidikan kolonial terlihat dengan jelas, yaitu bersifat terbatas dan diskriminatif. Belanda dengan sengaja membatasi pendidikan dengan tujuan untuk membatasi pengetahuan rakyat Aceh.

Dalam perkembangannya, pemuda-pemuda Aceh yang telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda dan juga dari sekolah-sekolah agama, sebagiannya menjadi tokoh-tokoh yang mempelopori munculnya kesadaran nasionalisme di daerah Aceh. Kondisi ini didorong juga oleh pengaruh *uleebalang* yang mendukung sekolah-sekolah pemerintah yang ada diwilayah mereka.

Untuk menguatkan kembali posisi agama dan pengaruhnya pada masyarakat, maka para ulama mendirikan sekolah-sekolah dan organisasi sendiri yang tidak dikendalikan oleh Belanda. Pada Tahun 1923, Muhammadiyah mulai hadir di

Aceh dan mendirikan HIS Islam di Kutaraja tahun 1928. Hal ini mendorong ulama-ulama Aceh untuk membangun puluhan sekolah agama. Sampai tahun 1936, di Aceh telah berdiri sekurang-kurangnya 98 madrasah. Mereka saling bersaing dalam mengusahakan kemajuan bagi daerah mereka masing-masing dan mengajak para ulama lain untuk mengajar disekolah-sekolah yang mereka dirikan. Perkembangan sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh para ulama merupakan suatu faktor yang memberikan harapan bagi munculnya perlawanan untuk menentang Belanda dikemudian hari. Sampai pada akhirnya, atas usul dari Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap seorang ulama besar Matang Geulumpang Dua, pada tanggal 15 Mei 1939 didirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.

4.1.6 Upaya Pemerintah Kolonial Belanda Menaklukkan Aceh

4.1.6.1 Menggunakan Vorte Verklaring

Selama perang Aceh, Van Heutz telah menciptakan surat pendek (*Korte Verklaring*, Traktat Pendek) tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Dimana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda.

Pada tanggal 15 Januari 1903 berlangsung upacara penyerahan diri Tuanku Muhammad Daud Syah kepada Belanda.

"Sultan telah diminta supaya menandatangani suatu pengakuan yang sudah disiapkan lebih dulu dalam mana disebut bahwa Aceh adalah menjadi bagian Hindia Belanda, dan ia berada dalam pengawalan gubernur van Heutsz. Dikatakan bahwa sejak itu Tuanku disebut beroleh tunjangan f. 1000.- sebulan. ; Ditetapkan oleh gubernur bahwa putera Sultan, Tuanku Ibrahim yang usianya 14 tahun sudah, dibawa ke Jakarta, di sana di"didik" sesuai dengan kedudukannya sebagai putera Sultan"(Muhammad Said, 1983 : 304).

Masalah penandatanganan ini terdapat pro dan kontra apakah sultan benar-benar menandatangani *vorte verklaring* tersebut. Sumber Indonesia mengatakan bahwa Sultan tidak ada menandatangani pengakuan bahwa Aceh sudah takluk dan sekaligus disebut menjadi bagian "Hindia Belanda (Teuku Syahbuddin Razi Pasenu, 25 Maret 1976). Belanda sendiri tidak pernah membuktikan adanya penandatanganan itu. Seandainya sesuatu surat pengakuan Sultan dimaksud ada, tentu dengan mudah Belanda dapat memamerkan orisinilnya atau klisenya, sehingga bisa terbukti apa yang sudah disebut-sebut dalam surat pengakuan penyerahan diri tersebut.

"Dalam *Encyclopaedia van Nederland Indie* tentang Aceh terdapat kalimat yang menandaskan bahwa sedikit pun tidak ada pengaruhnya terhadap umum dari penyerahan diri Sultan ("vaneenigen invloed op den algemeenen toestand was intusschen deonder werping van den Sultan *niet")* (Op.Cit, hal 305).

Sesungguhnya orang Belanda sudah lama menyadari sebatas mana praktisnya seseorang Sultan memiliki nilai di masa perang. Pengalaman telah membuktikan bahwa Aceh tidak membutuhkan Sultan untuk terus segigih-gigihnya menentang kita.

Setelah Sultan menyerah, nyatanya tingkat perjuangan agak menurun, dan ini dirasakan pengaruhnya oleh Panglima Polim Muhammad Daud. Tidak beberapa

bulan sesudah Sultan di Banda Aceh, Panglima Polim pun menyampaikan keinginannya menyerah. Surat yang pernah didiktekan oleh pembesar Belanda kepada Panglima Polim ketika penyerahannya pada tanggal 21 September 1903, antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Saja hendak menghadap dan menjerahkan badan ke bawah doeli Padoeka Toean Besar, sesoenggoehnja mengakoelah saja bahwa daerah tanah Atjeh serta ta'loek djadjahannja djadi soeatoe bahagian dari keradjaan Wolanda, maka wadjiblah atas badan saja selama-lamanja bersetia kepada Baginda Sri Maharadja Wolanda dan kepada wakil Baginda jaitoe Padoeka Sri Toean Besar Gouverneur Generaal India Nederland dan segala atoeran dan keputusan jang didjatuhkan atas badan diri saja, maka saja terima dan djoendjoeng diatas batoe kepala saja dan segala atoeran dan perintah jang diberi oleh seri padoeka Toean Besar Gouverneur di tanah Atjeh, maka saja menoeroet dan mendjalankan dengan sebetoelnja." (*Ibid*, hal 305-306)).

Meskipun demikian, penandatanganan vorte verklaring yang dilakukan oleh sultan dan beberapa pimpinan perlawanan rakyat Aceh, tidak memiliki arti politis bagi perlawanan rakyat Aceh. Menurut Muhammad said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad, hal ini disebabkan :

Pertama, kedudukan Sultan sebagai raja di Aceh (monarchi) tidaklah mutlak (tidak absolut). Untuk melaksanakan sesuatu keputusan apalagi yang penting-penting, Sultan harus mengadakan musyawarah terlebih dulu dengan orang-orang besarnya. Mengenai kedudukan Panglima Polim, dari pribadi memang dia seorang yang berpengaruh. Tapi secara resmi (formal) kedudukan Polim tidak besar dan tiada menentukan. Dia hanya seorang panglima sagi. Kedudukannya mengenai masalah kerajaan, adalah dalam hal menentukan siapa yang akan menjadi Sultan pengganti yang sudah meninggal atau yang dimakzulkan. Kedua, Belanda sendiri sebetulnya sejak semula tidak pernah mengakui Tuanku Muhammad Daud sebagai Sultan atau kepala pemerintah kerajaan di Aceh. Hingga kepada penyerahannya, Belanda masih menggunakan sebutan "*pretendent*", artinya orang masih menuntut, atau paling-paling calon, untuk menduduki kursi (tahta) tersebut. Belanda tidak pernah memandang bahwa Tuanku Mohammad Daud Syah sebagai orang yang sedang menjadi Sultan. Proklamasi jenderal van Swieten dalam tahun 1874 mengatakan bahwa Belanda tidak mengakui penabalan seseorang Sultan di Aceh tanpa persetujuannya. Konsekuensi pengumuman Belanda tersebut, kini telah menikam dirinya sendiri; pengakuan Sultan Daud. bahwa dia menyerahkan Aceh kepada Belanda bukanlah suatu pengakuan seseorang pemerintah yang berwenang, menurut pendirian Belanda sendiri. Ketiga, sebelum Sultan menyerah,

kekuasaan pemerintahan Aceh telah dipindahkan atau diambil alih para pejuang, dalam hal ini terutama para ulama. Keempat, wilayah Aceh yang masih bebas dari kekuasaan de fakto Belanda, masih cukup luas (*Ibid*, hal 306-307).

Dr. Snouck Hurgronje sendiri pernah menulis dalam bukunya mengenai terbatasnya kekuasaan Sultan. Antara lain katanya:

"Naar de leer der Atjeche Adat, zoowel als die der heilige wet, is de Sultan niets zonder de drie panglima sagi die hem die ijdelen naam geschonken hebben en de ulamas, en in werkelijkheidis hij nog minder, daar ook dignitarissen zich niets om hem bekommeren"("Menurut adat dan juga hukum agama, Sultan tidak berarti apa-apa tanpa tiga kepala sagi yang mengangkatnya memegang kedudukan tinggi itu, dan para ulama, dan sebetulnya Sultan masih kurang lagi sebab pada kenyataannya orang-orang besar tidak tunduk kepadanya") (Muhammad Said, Jilid I hal 567).

Perang Aceh adalah suatu perang semesta rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda, yaitu suatu "*volks-oorlog*". Dan ini pun sudah dijelaskan sendiri oleh Dr. Snouck Hurgronje ketika dia mengemukakan usul-usulnya kepada pemerintah jajahan Belanda mengenai usaha menghadapi tantangan Aceh. Dia mendesak supaya dihentikan ikhtiar mencari hubungan dengan Sultan (dia menyebut: *Keumalaparty*).

Dengan masih adanya wilayah bebas, masih adanya penghuni yang tersusun hidupnya dalam suatu pemerintahan penduduk aslinya sendiri yang berkuasa dan ditaati, maka tidaklah berharga adanya sesuatu pengakuan di atas kertas kalau pun pernah ada, oleh seseorang yang menyerahkan begitu saja wilayah itu kepada orang lain atau musuh, lebih-lebih jika orang itu dalam keadaan terpaksa (*force mayeure*).

Perlawanan yang terus menerus di Aceh baik oleh siapa pun dari rakyatnya menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya "hak" Belanda seandainya Belanda mungkin mendapat secarik kertasnya baik dari Sultan maupun dari Panglima Polim itu. Bahwa penyerahan Sultan tidak memberi efek sama sekali terhadap semangat perjuangan rakyat Aceh, secepatnya telah dirasakan oleh Belanda dan membuat para pemimpin tentara berpikir mencari cara lain dalam memadamkan perlawanan rakyat Aceh.

4.1.6.2 Menggunakan Tenaga Uleebalang

Setelah masa Perang Aceh yang panjang, akhimya Belanda berhasil menduduki Aceh. Pendudukan Belanda ini ternyata. membawa implikasi bagi keseimbangan masyarakat Aceh karena salah satu unsur dari masyarakatnya yaitu sultan, dihapus keberadaannya oleh Belanda. Berbeda dengan kebijakan Belanda di Jawa yang tetap mempertahankan institusi pemerintahan yang ada seperti kesultanan, Belanda ternyata tidak memandang perlu untuk mempertahankan Kesultanan Aceh. Agaknya setelah merasa menaklukkan Aceh Belanda menganggap pihaknya telah mempunyai posisi yang cukup kuat di Aceh.(Eric Morris, 1989 : 89). Selain itu kemungkinan Belanda setelah pengalaman Perang Aceh, melihat Kesultanan Aceh adalah ancaman bagi mereka karena sultan adalah simbol perlawanan rakyat Aceh kepada Belanda. Pada masa selanjutnya kedudukan sultan semakin terpinggirkan dalam masyarakat Aceh sehingga keturunan sultan lebih mengambil sikap netral.(M.Isa Sulaiman, 1999 : 527).

Perhitungan Belanda tersebut tidak sepenuhnya benar. Perlawanan terhadap Belanda setelah menyerahnya sultan memang menyurut tapi bukan berarti

berhenti sama sekali karena kemudian perang ini dilanjutkan oleh ulama. Ulama merupakan pendukung setia sultan. Merekalah beserta beberapa *uleebalang* pendukung setia sultan yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Kaum ulama memberikan corak agama kepada perang ini dengan menyebutnya sebagai Perang Sabil, Mereka terus bergerilya di seantero wilayah Aceh hingga kira-kira sepuluh tahun setelah menyerahnya sultan.(M. Nazaruddin, 1990 : 17)

Berlainan dengan sikap ulama yang terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda, setelah berakhimya perang, kebanyakan *uleebalang* bersedia bekerja sama dengan Belanda. Gejala ini sebenarnya bisa dirunut sejak setahun setelah Perang Aceh meletus. Pada waktu itu ada sebagian *uleebalang* yang telah bersedia menandatangani Korte Verklaring atau Perjanjian Pendek. Perjanjian ini terdiri dari tiga pasal yang intinya pertama, setia kepada raja atau ratu Belanda, kedua menjadikan musuh Belanda sebagaimana musuhnya dan sebaliknya, ketiga menjalankan perintah raja atau ratu Belanda maupun wakilnya. Antara tahun 1874-1876, tercatat ada 31 *uleebalang* yang menandatangani perjanjian ini, (T. Ibrahim Alfian, 1999 : 135), sedangkan pada tahun 1900 tercatat 82 dari 100 *uleebalang* di Aceh yang menandatangani Korte Verklaring.(Ibid, hal 132). Tampaknya menyerahnya sultan dan makin kerasnya tekanan Belanda membuat banyak *uleebalang* memilih untuk mau bekerja sama dengan Belanda.

Pada bulan Agustus 1909 misalnya, tiga orang uleebalang yaitu Tuanku Mahmud, Tuanku Raja Keumala, dan Teuku Panglima Polem mengajak para para ulama yang masih berjuang melawan Belanda yaitu Habib Wan dan teungku-teungku keturunan Teungku Cik di Tiro Muhammad Saman untuk *taslim* atau menyerah

kepada Belanda. Mereka beralasan bahwa dunia bukan seperti dulu lagi ketika orang-orang Aceh masih sama-sama berjuang melawan Belanda. Belanda. menurut mereka terlalu kuat untuk dilawan sehingga sudah cukup ikhtiar dan mereka patut *taslim*. Para *uleebalang* ini menambahkan lagi bahwa sikap menyerah kepada Belanda tidaklah salah karena Belanda tidak akan mengubah atau melarang agama Islam dan lagi menyerahnya Aceh kepada Belanda bukanlah yang pertama yang terjadi di dunia tetapi berlaku juga bagi India yang menyerah kepada Inggris.(Ibid, hal 146). Para ulama mengecam tindakan sebagian *uleebalang* ini seperti yang tergambar dari Hikayat Perang Sabil yang dibacakan untuk memberi semangat kepada pejuang Aceh yang isinya sebagian menyindir tindakan *uleebalang* ini:

Jeup-jeup tempat nyang ka geuprang uleebalang sajan jimeulise
Nyankeu sabab jeud sibok prang, uleebalang sayan kaphe
Galak geu that keu le areuta keu agama hana pike
Bukon keu uleebalang hana geusayang agama Nabi
Sebab galak raja peugagah, Tuhan amarah hana pike

Terjemahannya adalah sebagai berikut:
Tiap-tiap tempat yang diperang, hulubalang menghindar selalu
Itulah sebabnya sibuk perang karena hulubalang bersama kafir
Suka sekali mereka mengumpulkan harta untuk agama tiada mau berpikir
Demikian banyak para uleebalang tiada lagi sayang pada agama Nabi
Sebab senang raja bergagah amarah Tuhan tiada ditakuti
Tiada mereka ingat akan hari akhirat nikmat berlimpah Tuhan beri.

Perubahan sikap ini tampaknya dikarenakan *uleebalang* tidak lagi memiliki tentara yang cukup atau kalaupun mencukupi, mereka tidak dapat menggalang kerjasama dengan *uleebalang* daerah tetangganya. Seperti yang telah disinggung di atas, *uleebalang-uleebalang* adalah kesatuan yang terpisah satu sama lain yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Mereka adalah elite yang terasingkan dari rakyatnya sendiri. Seringkali mereka terlibat perselisihan satu sama lain. Karena perbedaan kepentingan itulah terdapat perbedaan-perbedaan dalam menyikapi kehadiran Belanda di Aceh, sehingga meskipun tadinya mereka melawan Belanda, mereka akhirnya memihak Belanda begitu melihat kesempatan yang lebih menguntungkan misalnya untuk mendapat kekuasaan atau kekayaan yang lebih besar.

Sikap oportunis *uleebalang* ini di satu pihak bertemu dengan kepentingan Belanda di pihak lain. Belanda memanfaatkan keadaan *uleebalang* sehingga berusaha merangkul mereka dengan janji-janji untuk mengakomodir kepentingan mereka. Untuk itu Belanda berhasil mengikat sebagian *uleebalang* ini dengan *Korte Verklaring* yang setelah diperpanjang pada tahun 1898 pun masih diperbaharui dengan Uniform Model Verklaring. Dalam perjanjian ini Belanda menegaskan posisi *uleebalang* sebagai raja di daerahnya masing-masing dengan jabatan *zelfbestuurder*.(Dada Meuraxa : 1989 : 36). Belanda dengan kembali menerapkan politik *devide et empera* di Aceh dengan menyokong *uleebalang* dan memerangi ulama.

Diangkatnya para *uleebalang* menjadi *zelfbestuurder* otomatis menempatkan mereka pada jajaran birokrasi kolonial Belanda di Aceh. Sebagai *zelfbestuurder*,

uleebalang bertugas memungut pajak dan lahan pertanian dan lahan produktif lainnya serta bertindak sebagai hakim untuk kejahatan kecil.(Ibid : hal 85). Pengalaman Belanda dalam Perang Aceh telah membuat Belanda amat berhati-hati dalam membuat kebijakan di Aceh terutama yang menyangkut urusan kerakyatan, untuk itulah Belanda memakai tangan *uleebalang* yang memang secara tradisional telah mengurusi urusan pemerintahan di tingkat bawah. Pentingnya *uleebalang* bagi Belanda di masa-masa awal pendudukannya di Aceh tergambar dari peringatan Gubernur Goedbart tahun 1927:

"…Sangatlah penting sekali-kali jangan dilupakan bahwa kekuasaan kita di Aceh terutama tergantung pada kaum *uleebalang*, di samping kekuatan bersenjata, tanpa mereka pada jangka panjang kita tidak akan mencapai apa pun juga…."(Anthony Reid, 1987 : 31).

Bergantungnya Belanda terhadap *uleebalang* membuat mereka memberikan berbagai keistimewaan kepada *uleebalang.* Mereka juga mendapat berbagai keuntungan-keuntungan yang sebelumnya, belum pernah mereka dapatkan seperti gaji, jaminan masa jabatan, dan garis-garis yang jelas bagi daerah kekuasaan mereka. Sebelumnya *uleebalang* kerap kali harus berperang satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan daerah kekuasaan yang memang belum pernah diberi garis demarkasi yang jelas seperti setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Jaminan keuangan berupa gaji cukup besar yaitu berkisar antara 240 sampai 10.200 gulden pertahun. Besarnya gaji yang variatif ini diukur berdasarkan besar kecilnya wilayah *uleebalang* dan juga stategis atau tidaknya wilayah tersebut dilihat dari kepentingan militer Belanda. Di antara *uleebalang-uleebalang* di seluruh Aceh, mungkin *uleebalang* Pidie-lah yang paling kaya karena menerima gaji yang paling besar. Karena mendapat gaji paling besarlah

kemungkinan *uleebalang* Pidie merupakan *uleebalang* yang paling loyal kepada Belanda seperti yang nanti ditegaskan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Segala keuntungan dan keistimewaan yang didapat *uleebalang* bukan berarti diberikan begitu saja oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai konsekwensinya, Belanda berhak mengatur penarikan pajak yang tadinya dimonopoli oleh uleebalang. Pajak yang dapat ditarik oleh *uleebalang* hanyalah pada barang yang akan keluar dari Aceh saja. Begitu pula dengan pasar, kalau tadinya semua pasar berada dalam kontrol *uleebalang* masing-masing wilayah pasar itu, maka kemudian hanya beberapa pasar kecil saja yang berada dalam kontrol *uleebalang*. Itu pun tetap diusahakan Belanda menjadi sebuah pasar yang bebas untuk dikuasai umum. Dengan kebijakan ini tampaknya Belanda ingin menjadikan *uleebalang* hanya sebagai administrator yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda sebagaimana berlaku di daerah-daerah lain yang ditaklukkannya di Nusantara.

Tetapi berbeda dengan aristokrat dari daerah lain, uleebalang pada dasarnya adalah pemilik modal dan bukan penguasa yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata-mata. Maka usaha untuk menjadikan *uleebalang* sebagai administrator di daerah masing-masing tidak dapat berhasil karena *uleebalang* tetaplah *uleebalang* yang secara tradisional berperan sebagai pengusaha. Kekuasaan yang diberikan kepadanya justerunya memberinya semacam legitimasi yang lebih kuat seperti penguasaan besar-besaran atas tanah; pungutan-pungutan seperti pungutan 10% dan pelaksanaan hukum waris; pengalihan kepemilikan

tanah yang ditinggalkan pemiliknya kepadanya; monopoli-monopoli; penyitaan tanah; hak pengerahan kerja rodi; dan pajak atas irigasi. Beberapa *uleebalang* bahkan masih berusaha dengan cara yang jelas-jelas tak legal seperti menggelapkan zakat.

Praktik-praktik yang dilakukan oleh uleebalang ini ditambah lagi oleh tindakan segelintir *uleebalang* yang jelas merupakan pelanggaran agama Islam seperti judi, dan mabuk-mabukan, tentu saja meresahkan rakyat. Kekuasaan *uleebalang* yang hampir tak terbatas ini membuatnya mampu melaksanakan apa pun kehendaknya pada rakyat misalnya apabila ia menginginkan seorang wanita tapi wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, maka ia dapat saja menjatuhkan tuduhan pada suami wanita tersebut, kemudian ketika sang suami sedang dihukum penjara, sang uleebalang ini pun mengambil wanita ini untuk dijadikan isterinya. Menghadapi sikap *uleebalang* ini rakyat tampaknya tidak dapat berbuat banyak. Rakyat secara tradisional memang mengabdi kepada *uleebalang* di daerahnya masing-masing.

Bentuk pemerintahan yang didirikan di Aceh juga mencerminkan strategi Belanda untuk menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Dalam hal ini, bentuk pemerintahan yang diberlakukan di Aceh didasarkan pada sistem pemerintahan langsung dan tidak langsung. Pemerintahan langsung dilaksanakan diwilayah-wilayah yang kemudian dikenal sebagai kabupaten Aceh Besar, kewedanaan Singkel dan disebagian kota-kota didaerah pesisir seperti Sigli, Bireun dan Lhokseumawe. Sementara wilayah yang berada diluar tempat-tempat tersebut secara tidak langsung diperintah Belanda melalui para *uleebalang* setempat.

"*Uleebalang* sudah dikenal sejak masa kerajaan Aceh, istilah *uleebalang* itu tidak mengacu pada pengertian kepala laskar, melainkan lebih berarti raja-raja yang ditaklukkan yang disebut Kepala Pemerintahan Daerah Otonom dan Pemangku Hukum Adat di daerahnya"(Tgk.A.K. Jakobi, 1998:296).

Sistem pemerintahan tidak langsung ini merupakan pengakuan Belanda terhadap para *uleebalang* sebagai pimpinan yang mempunyai pemerintahan sendiri diwilayah mereka masing-masing. Namun, pemerintahan tidak langsung itu tidak saja menjadikan para *ulebalang* sebagai penyangga antara Belanda dengan para gerilyawan, melaikan juga sebagai musuh para gerilyawan. Para *uleebalang* diharuskan oleh Belanda memperlakukan musuh kaum kolonial sebagai musuh mereka sendiri.

Di Aceh dikenal dua macam daerah, yaitu yang langsung diperintah oleh Belanda (Aceh Besar) dan daerah yang diperintah oleh sultan. Namun setelah sultan menyerah, Belandalah yang memerintah langsung daerah itu menggantikan sultan. Di luar Aceh Besar yang dahulu terdiri dari banyak kerajaan kecil yang takluk kepada sultan, oleh karena sultan tidak ada lagi maka daerah tersebut takluk kepada Belanda, (Ismail Suny, 1980:136).

Belanda mengakui kerajaan-kerajaan kecil atau negeri itu sebagai swapraja atau zelfbestuur, yaitu negeri yang berdiri sendiri dan diperintah langsung oleh raja-raja atau *uleebalang* dan kepala adatnya langsung dibawah pengawasan Belanda.

"Pemerintah Belanda mengankat orang-orang kepercayaannya ditiap-tiap daerah seorang *uleebalang* atau zelfbestuur yang memerintah dalam satu landscap Belanda menggunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diserahkan kepada *uleebalang-uleebalang* ditiap-tiap daerah kekuasaannya masing-masing"(Al Chaidar, 1999:80).

Bagi Belanda kekuasaannya di Aceh terutama tergantung pada kaum *uleebalang*, disamping kekuatan bersenjata karena para ulebalang ini mempunyai pengaruh terhadap penduduk dan akan bisa memungkinkan Belanda mencapai tujuan yang diinginkannya yaitu menaklukan Aceh dengan menggunakan tenaga orang Aceh sendiri yaitu *uleebalang*. Keberhasilan pasukan Belanda dalam menumpas pasukan gerilyawan muslimin karena pengkhianatan orang-orang Aceh sendiri, yaitu para kaum bangsawan yang menjadi kolaborator Belanda (*http://browiez.blogspot.com*). Cara yang digunakan Belanda ini cukup efektif meredam perlawanan-perlawanan para gerilya, meskipun perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung.

Belanda juga memberikan kesempatan kepada para *uleebalang* untuk mengambil peran penting disektor perdagangan. Kesibukan *uleebalang* mengurus perdagangan menyebabkan mereka tidak lagi menghiraukan kepentingan rakyat dan perlawananan yang terjadi, bahkan cenderung membantu Belanda menumpas para gerilyawan. Kebanyakan para *uleebalang* hidup mewah ditengah rakyatnya yang miskin dan penuh kebencian kepada Belanda. Kondisi ini dimanfaatkan Belanda untuk bersikap lunak terhadap *uleebalang*, sehinga terbuka kesempatan berbuat leluasa terhadap rakyat Aceh.

Kondisi ini menimbulkan kebencian rakyat Aceh, terutama para ulama yang nantinya menimbulkan perselisihan yang begitu tajam antara ulama dan *uleebalang*. Perselisihan ini dijadikan Belanda untuk memecah konsentrasi kekuatan perlawanan rakyat Aceh yang lebih banyak dipimpin para ulama.

4.1.6.3 Menjauhkan Ulama dari Rakyat

Setelah menyerahnya sultan dan para pemimpin lainnya seperti Panglima Polim, perjuangan di Aceh memiliki bentuk yang lebih berkesan lagi. Jika pada perjuangan di masa lampau masih mungkin ditemui pimpinan perjuangan patriotisme dari kalangan kaum raja yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi dan unsur mempertahankan kebesaran pribadi, maka perjuangan lanjutan ini adalah semata-mata atas jalan Allah, *fi sabilillah*. Pada hakikatnya faktor para ulama dengan petuah-petuah atau anjuran bahkan pimpinan langsung merekalah yang mengobarkan perang Aceh sampai sedemikian hebat berkecamuknya.

Dr. Snouck Hurgronje yang sudah mempelajari secara dalam tentang hukum Islam dan perintah-perintah yang wajib dijalankan oleh penganutnya, telah menginsafi bahwa ulama-ulama pejuang adalah kaum patriot yang tak kenal damai dan tak kenal tunduk kepada kaum kafir, penjajah Belanda. Snouck Hurgronje menyarankan kepada pemerintah Belanda untuk mengambil kebijakan merangkul *uleebalang* dan menyingkirkan ulama atau para teungku. Sultan tidak berarti apa-apa, tetapi kaum alim ulamalah yang memegang kendali semangat perjuangan rakyat Aceh, karena itu tidak ada damai dengan kaum alim ulama. (M.H. Gayo, 1983: 108)

Menurut pendapat Snouck Hurgonje, tidaklah ada gunanya mengimpi-ngimpikan perdamaian dengan mereka (para ulama) atau pun untuk mengharapkan kesukarelaan mereka untuk menyerah. Dari sebab itulah, sebagaimana telah dikemukakan, di pihak Belanda sebagai reaksi terhadap pendirian konsekuen dari

para ulama Aceh tersebut, Snouck telah mempengaruhi pemerintahnya supaya mereka itu dikejar ke manapun dan bila ditemukan ditembak mati.

Tidaklah hanya suatu kebetulan bahwa pihak ulama dan para pemimpin perjuangan Aceh sendiri pun telah mengetahui pandangan Belanda sedemikian. Dengan menghadapi kenyataan ini para ulama dan pejuang mengajukan tantangan terhadap Belanda dengan jihad total. Karena kedudukan pemerintahan dalam bentuk tetap sudah tidak mungkin diadakan maka ditetapkanlah oleh mereka bahwa pimpinan pemerintahan menjadi berpindah-pindah (mobil). Melalui cara ini diatur perjuangan serentak bagi seluruh wilayah Aceh. Nama nama tokoh berikut adalah aktif di sekitar sudah menyerahnya sultan dan Polim: Aceh Besar: Teungku Di Eumpee Trieng, Teungku Mat Amin anaki Teungku Di Eumpee Trieng (yang menguasai wilayah gerilya Aceh Besar bagian selatan dan berpusat di sekitar Peukan Bada), kedua ulama tersebut belakangan adalah putera Syekh Saman Di Tiro dan masih banyak ulama-ulama lainnya.

Di bagian Aceh Timur, sungguh pun wilayah ini berbatas dengan dan dekat ke Sumatera Timur, namun perlawanan gerilya tidak kurang pula hebatnya digerakkan di sini, baik oleh pejuang-pejuang dari Aceh Utara maupun dari Aceh Barat/Selatan dan Gayoluos/Alas. Dalam menghadapi perlawanan ulama secara serempak itu, maka militer Belanda berusaha memburu dan menembak mati tokoh ulama yang memimpin gerilya tersebut. Pengalaman Belanda sendiri telah membuktikan bahwa para ulama memiliki pengaruh yang besar terhadap rakyat dan dapat mempengaruhi rakyat untuk terus berjuang melawan agresi militer Belanda.

Upaya Belanda untuk menjauhkan para ulama dari rakyat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Setidaknya para ulama menyadari tindakan ini kepada mereka, sehingga mereka mengatur setiap ada gerakan perlawanan terhadap tentara Belanda, maka tokoh yang memimpin tidak ditonjolkan kedepan (dirahasiakan), hal ini dilakukan untuk mengecoh tentara Belanda dan melindungi para ulama itu sendiri. Selain terus mengejar para ulama, Belanda juga berusaha mengadu domba para ulama dengan ulebalang yang ada dipihaknya. Usaha-usaha Belanda ini pada akhirnya tidak dapat memadamkan perlawanan rakyat Aceh secara keseluruhan, karena terus muncul perlawanan diberbagai daerah walaupun tidak besar seperti dalam perang Aceh masa sultan ataupun yang terjadi di Gayo Alas.

Memasuki tahun 1920-an, Aceh mengalami serangkaian perubahan. Sedikit demi sedikit, sangat lambat tapi pasti, Belanda mengambil kontrol atas seluruh Aceh, baik dengan pernerintahan langsung atas wilayah-wilayah Aceh Besar (Kutaraja dan sekitarnya), Singkel (Aceh Timur), Sigli, Bireun, Lhokseumawe, Lhoksukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Meulaboh, dan Tapak Tuan; maupun pemerintahan tak langsung (melalui uleebalang) di 93 nanggro di luar tempat-tempat yang diperintah langsung tersebut.(Nazaruddin Sjamsuddin, 1998 : 17). Meskipun bentuk-bentuk perlawanan masih ada, tetapi pada saat ini bentuknya menjadi sendiri-sendiri dan sporadis. Pada masa ini Aceh tidak lagi memiliki tokoh pejuang legendaris seperti Teungku Cik di Tiro, Cut Nyak Dien, atau pun tokoh-tokoh lainnya. Para ulama besar pun satu per satu wafat seperti Habib Samalanga yang meninggal dunia karena usia. Ulama militan ini kemudian digantikan oleh ulama yang hanya menyibukkan diri dengan kitab-kitabnya.

Pengasingan ulama dari kehidupan politik memang mempakan tujuan kebijakan Belanda demi menegakkan rust en orde (keamanan dan ketertiban) di Aceh. Ulama digiring hanya untuk mengurusi kepentingan agama saja terlepas dari urusan politik sehingga pengaruh mereka terhadap penduduk menjadi sangat terbatas.

Pengaruh ulama makin lama makin berkurang dengan mulai diperkenalkannya sistem pendidikan sekuler di Aceh yang segera menyaingi sistem pendidikan yang telah lama ada yaitu dayah atau pesantren. Pengenalan sistem pendidikan sekuler oleh Belanda tampaknya mempunyai tujuan ganda yaitu untuk memenuhi kebutuhan? kebutuhan birokrasi dan terutama untuk membendung tekanan pendidikan ulama yang selalu mengutuk Belanda yang “kafir” kepada anak-anak Aceh. Sejak tahun 1907, sekolah sekuler telah diperkenalkan di Aceh berupa Sekolah Desa (Volkschool), sedangkan Sekolah Menengah Pertama (MULO) baru didirikan di Kutaraja pada tahun 1930. Pendidikam sekuler ini terutama ditujukan kepada kaum uleebalang yang memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi.

Belanda membangun Sekolah Desa atau Volkschool untuk rakyat biasa yang tujuannya menyiapkan rakyat untuk dapat membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dan aksara Latin. Namun usaha memasukkan rakyat ke sekolah sekuler ini kurang mendapat sambutan rakyat. Mereka enggan memasuki atau memasukkan anak-anak mereka ke sekolah ini karena masih kuatnya sikap antipati kepada sesuatu yang berbau Belanda. Mereka bahkan mempelesetkan Sekolah Desa tersebut sebagai sikula desya yang berarti sekolah dosa.(T.Ibrahim

Alfian, Op.Cit.hal 199) Namun demikian, lama-kelamaan rakyat pun dapat menerima keberadaan sekolah sekuler ini meskipun mungkin pula terdapat keterpaksaan. Sampai tahun 1939 terdapat 348 Sekolah Desa, 45 Sekolah Dasar lanjutan (Velvolgschool), 4 ELS (Europeesche Lagere School/Sekolah Dasar Eropa), dan 1 MLTLO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs/Sekolah Menengah Pertama) .

Kombinasi antara mulai diperkenalkannya model pendidikan yang baru dan tumbuhnya sarana transportasi yang lebih lancar, secara langsung mau pun tidak langsung membuka keterisolasian Aceh dan dari luar yang terjadi selama tahun-tahun peperangan sebelumnya. Lewat pelajar-pelajar Aceh yang kebanyakan berasal dari golongan uleebalang, rakyat Aceh mulai diperkenalkan dengan organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Ide-ide nasionalisme Indonesia pun mulai masuk meskipun lingkupnya masih sangat terbatas karena hanya dapat diterima oleh segelintir orang yang berpendidikan Belanda dan yang bersentuhan langsung dengan pusat gerakan nasionalisme tersebut di Pulau Jawa yang notabene adalah uleebalang seperti Teuku M. Thayeb dan Teuku Nyak Arif. Keduanya adalah uleebalang-uleebalang berpendidikan Belanda yang pernah menjadi anggota volktraad di Batavia. Bagi ulama, perkembangan-perkembangan ini membawa keuntungan tersendiri karena dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan telekomunikasi, mereka dapat lebih mudah menemui dan berkomunikasi dengan rakyat dalam tablig-tablig hingga ke tempat-tempat yang jauh dari asal mereka.

Ulama sebagai salah satu elite dalam masyarakat Aceh mempunyai karakteristik yang khas karena merupakan satu-satunya kelompok masyarakat yang terlepas dari tempat dari mana ia berasal. Hal ini dimungkinkan oleh pengalaman para ulama ini melewati berbagai tempat di Aceh seperti perjalanan mereka ketika akan menuntut ilmu agama dari kampung mereka ke dayah atau pesantren. Dengan pengetahuan dan wawasan ulama yang relatif lebih banyak dari orang lain, maka ide-ide pembaharuan terutama dalam bidang keagamaan banyak datang dari kaum ulama.

"kemajuan sekolah-sekolah sekuler yang disokong Belanda, telah merugikan pendidikan agama dan menimbulkan perkembangan politik yang rumit di Aceh karena keadaan ini meski memperkuat hubungan antagonistis antara ulama dan uleebalang di satu pihak, tetapi di pihak lain justeru menyadarkan uleebalang-uleebalang tertentu akan pentingnya gerakan keagamaan sehingga menimbulkan pula konflik maupun rekonsiliasi antara ulama dan uleebalang".(Nazaruddin Sjamsuddin, Op.Cit. hal 19)

Tumbuhnya sistern pendidikan sekuler semacam volkschool atau pun masuknya lembaga pendidikan yang berasal dari luar Aceh seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa, telah mendorong beberapa ulama untak beradaptasi, menjawab tantangan ini dengan memperbaharui sistem dayah yang telah ada dengan cara-cara baru dan modern. Untuk mendukung cara-cara baru dan modern ini, para ulama merekrut orang-orang muda tamatan perguruan-perguruan Islam modem dari Sumatra Barat, Jawa, dan Mesir, maupun Mekah. Tidak dapat diabaikan pula masuknya reformasi Islam yang tengah marak di dunia Islam sejak permulaan abad ke-20 sehingga di Aceh mulai timbul kegairahan baru terutama di kalangan ulama-ulama muda untuk mempejuangkan pembaharuan Islam sesuai dengan

Alquran dan Hadis dengan memerangi praktik-praktik yang bertentangan dengannya.

Untuk mengimbangi pendidikan sekuler Belanda dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi Islam, maka pendirian sekolah-sekolah agama dalam artian yang modern seolah tak terbendung lagi. Dimulai dari pendirian perguruan Islam di Seulimeun Aceh Besar (1926), Nahdatul Islam di Idi Aceh Timur (1928), dan Djamiatul Diniyah (1930) di Sigli, Pidie, sekolah-sekolah agama terus bermunculan di seantero Aceh. Para uleebalang pun berlomba-lomba untuk menyokong pendirian sekolah semacam ini di daerahnya dan bertindak sebagai pelindungnya. Pada tahun 1930, dengan ikut dimotivasi oleh surat Teungku Syech Abdul Hamid dari Mekah, Teungku Muhammad Daud Beureueh menyelenggarakan musyawarah besar ulama Aceh yang kedua di Garot, Sigli.

> "Musyawarah ini menghasilkan dua kesepakatan: pertama meningkatkan dakwah serta memperbaharui cara-caranya, Kedua, memperbaharui sistem pendidikan sehingga dapat menarik minat anak-anak dan pemuda-pemuda untuk belajar pada sekolah-sekolah agama yang perlu didirikan di samping pesantren atau dayah yang sudah ada". (M. Nur El lbrahimy, 1984 : 2).

Namun maraknya pendirian sekolah-sekolah ini menyebabkan berbeda-bedanya kurikulum, lamanya belajar, hingga pada buku-buku yang dipakai sebagai acuan pambelajaran. Selain itu, sekolah agama ini tidak semuanya dalam keadaan baik karena berbeda-bedanya pula kemampuan keuangan, sumber daya pengajar, maupun kombinasi keduanya.

Untuk itu M. Nur El Ibrahimy, kepala Madrasah Nahdatul Islam (MADNI) yang peduli pada pendidikan di Aceh, mengajukan gagasan untuk menyeragamkan

kurikulum sekolah-sekolah agama di Aceh. Teungku M. Daud Beureueh menyambut gagasan ini dan kemudian memprakarsai pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan sekolah-sekolah di sekitar Sigli. Mereka pun menerima gagasan penyeragaman kurikulum tersebut yang kemudian dapat direalisasikan mulai tahun 1938, meskipun masih secara terbatas di daerah Sigli dan sekitarnya.

Ide penyeragaman kurikulum ini segera saja meluas ke seluruh Aceh. Lewat pertemuan-pertemuam yang kerap di antara ulama-ulama diiringi semangat penyeragaman kurikulum sekolah agama, maka timbul gagasan pendirian Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 5 Mei 1939 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1358. Pemilihan tanggal 12 Rabiul Awwal yang bersamaan dengan maulid Nabi Muhammad SAW tampaknya bukan kebetulan semata. Kelahiran PUSA ini agaknya merupakan simbol kelahiran kembali Islam khususnya di Aceh sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terpilih sebagai ketua I PUSA adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdurrahman Matang Geuleumpang Dua sebagai ketua II, Teungku Muhammad Nur El lbrahimy sebagai sekretaris I, Teungku Ismail Jacob sebagai sekretaris II, dan Teuku Muhammad Amin sebagai bendahara. Selain pengurus inti ini masih ada lagi pembantu-pembantu, penasihat, dan pelindung. (M Nur El lbrahirny, 2001: 8). Di dalam PUSA juga terdapat badan-badan seperti Majelis Tanfidziah Syariah diketuai oleh Teungku Hasballah Indrapuri, Pemuda PUSA diketuai oleh Teungku Amir Husin Al Mujahid, Kasyafatul Islam diketuai oleh A. Gani Mutiara dan M. Nur El Ibrahimy, serta sebuah majalah Penyuluh dipimpin oleh Ismail Jacob dan kemudian Amelz (Abdul Manaf El Zamzami).

Penunjukan Daud Beureueh sebagai ketua I PUSA pada saat itu bukanlah suatu hal yang luar biasa. Ia adalah ulama yang meskipun dididik Islam secara tradisional, tetapi terbuka pada pembaharuan, pendidikan, maupun dalam pelaksanaan ibadah Islam. Ia pun mempunyai perhatian yang besar dalam kegiatan sosial. Teugku Muhammad Daud Beureueh juga terkenal akan kepiawaiannya berorasi. Dalam setiap tablignya dipastikan akan menarik ribuan orang untuk menghadirinya. Pola-pola kepemimpinan Daud Beureueh yang karismatis inilah yang membuatnya begitu populer di mata masyarakat.

Pada struktur kepengurusan PUSA terdapat pula Teuku Cik Muhammad Djohan Alamsyah sebagai pelindung organisasi. Penunjukkannya sebagat pelindung tampaknya cukup strategis bagi kelangsungan PUSA. Teuku Cik Muhammad Djohan atau dikenal juga sebagai Teuku Cik Peusangan adalah uleebalang yang paling disenangi Belanda. Oleh karena itu para penentang PUSA seringkali memakai ini sebagat alasan untuk menuduh PUSA sebagai kaki tangan pemerintah Belanda meskipun Teuku Cik Peusangan sebagai pelindung tidak mempunyai kekuatan untuk ikut campur dalam internal organisasi. Pada saat itu, penunjukan Teuku Cik Peusangan mempakan hal yang biasa. Teuku Cik Peusangan terlepas dari kelas sosialnya sebagai uleebalang merupakan pribadi yang simpatik. Secara umum memang tidak ada permusuhan antara PUSA dengan uleebalang kecuali pertentangan pribadi antara Teungku M. Daud Beureueh dengan Teuku Umar Keumangan. Daud Beureueh lahir di Keumangan daerah kekuasaan uleebalang tersebut. Teuku Umar menghalangi usaha Daud Beureueh dalam membuka dan mengembangkan sekolah agama Djamiatul

Dinijah di Keumangan sebingga kemudian sekolah ini didirikan di Blang Pase, Pineung yang masih termasuk daerah Pidie pada tahun 1931.

Munculnya PUSA ternyata membawa optimisme baru bagi ulama pendukungnya maupun bagi sebagian besar rakyat Aceh. Berdirinya PUSA sebagai zaman mulai naik setelah sebelumnya zaman turun. Sambutan rakyat yang amat besar pada PUSA disebabkan ulama-ulama PUSA-lah yang menguasai madrasah dan penyebaran zaman kemajuan, Orang-orang Aceh melihat PUSA sebagai "produk asli Aceh" bukan seperti Muhammadiyah atau Taman Siswa yang terlanjut diberi cap sebagat organisasi "Minang" dan "Jawa". Antusiasme rakyat Aceh ini dengan keadaan ekonomi Aceh pada tahun 1930-an yaitu meningkatnya pengangguran akibat resesi ekonomi dan penyakit yang menyerang kebun lada yang mempakan sumber mata pencaharian banyak orang Aceh ketika itu, sedang untuk bekerja di perkebunan lain seperti perkebunan pinang dan kopra tidak dimungkinkan oleh kebijakan Belanda yang melarang hal tersebut.

Pada perkembangannya, PUSA meski berdiri dengan semangat ingin memajukan usaha-usaha pendidikan di Aceh, akhimya mulai melebarkan usahanya ke arah pembaharuan Islam yang mau tidak mau akhimya pun bersentuhan dengan politik. Dalam rapat-rapat umum yang diselenggarakan PUSA di seluruh Aceh, mereka menyerukan reformasi Islam yang dihubungkan dengan pembaharuan sejarah masyarakat Aceh. Untuk itu mereka senantiasa menyerang praktik-praktik keagamaan tradisional yang terkadang mengandung unsur sinkretisme seperti mistik dan pemujaan orang-orang suci. Mereka melihat banyak praktik-praktik ibadah Islam telah bercampur dengan ritual-ritual yang dilakukan sejak zaman

pra-Islam termasuk perbuatan-perbuatan uleebalang yang dianggap banyak menyimpang ajaran agama Islam seperti judi dan minuman keras.

4.1.6.4 Menggunakan Cara Simpatik

Cara kekerasan yang digunakan Belanda dalam usahanya menaklukkan perlawanan rakyat Aceh ternyata berdampak pada kebencian yang mendalam rakyat Aceh pada tentara Belanda yang dianggap *kaphe* (kafir). Untuk itu, pemerintah Belanda mulai menyadari tindakan kekerasan terhadap rakyat Aceh tidak dapat memadamkan perlawanan rakyat Aceh secara keseluruhan. Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mencoba menerapkan politik pasipikasi yaitu politik yang menunjukkan sifat damai, dimana Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh dan berusaha menimbulkan rasa simpatik rakyat Aceh.

Politik pasipikasi mulai diperlihatkan Belanda dengan membangun sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan-jembatan, irigasi-irigasi dan pelabuhan-pelabuhan. Setelah Aceh Besar, pembangunan selanjutnya ditunjukan kedaerah-daerah lain diluar Aceh Besar. Antara tahun 1915-1918 pembuatan jalan di Aceh terus mengalami peningkatan, jalan-jalan yang telah ada diperbaiki dan diperpanjang (Rusdi Sufi, 2004:157).

Era awal pemerintahan kolonial Belanda di Aceh juga ditandai oleh pembangunan sarana transportasi. Selama Perang Aceh berkecamuk, Belanda memang telah membangun jalan-jalan utama disepanjang pantai utara dan selatan dengan jalan-jalan penghubung ke daerah pedalaman dengan maksud memudahkan gerak

pasukan mereka dalam menghadapi gerilyawan Aceh, tetapi setelah perang, Belanda kembali melanjutkan pembukaan daerah-daerah terisolir di Aceh untuk memudahkan kegiatan perekonomian. Pada tahun 1919, seseorang telah dapat pergi ke Medan dan Kutaraja dengan menggunakan kereta api.

Maanfaat pembangunan jalan-jalan ini mulai dirasakan oleh rakyat Aceh dan para ulama yang masih mencoba menentang kekuasaan Belanda. Pembangunan sarana komunikasi telah memungkinkan para ulama dan santri untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dalam rangka dakwah dan pembaharuan agama. Para ulama dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang ada diluar desa mereka.

Dalam bidang pertanian, pemerintah Belanda berusaha menggalakkan dan meningkatkan hasil produksi pertanian rakyat, cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bantuan modal kepada rakyat dan *uleebalang*. Selain itu, pemerintah Belanda mendirikan bank di Aceh Besar yaitu *de Groot Atjehsche Afdeeling bank*. Rakyat yang menginginkan bantuan kredit untuk membuka kembali atau memperluas kebun-kebun dan sawah-sawah mereka dapat meminjam modal dari bank tersebut, tanpa dikenakan bunga.

Selain berusaha meningkatkan hasil produksi bersawah yang merupakan sumber penghasilan utama rakyat, pemerintah Belanda juga mengusahakan perbaikan-perbaikan pada usaha pertanian rakyat lainnya yang merupakan komoditi tradisonal rakyat Aceh. Pemerintah Belanda menganjurkan kepada rakyat agar mengusahakan dan meremajakan pohon-pohon kelapa, pinang dan lada pada kebun-kebun mereka dengan memberikan pinjaman modal serta memberikan varietas bibit yang baik.

Dibidang pendidikan, pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pendidikan barat kepada rakyat Aceh, melalui cara ini diharapkan rakyat Aceh tidak lagi terpengaruh dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh para ulama untuk menentang Belanda. Belanda menganggap perlawanan rakyat Aceh digerakkan oleh nilai-nilai yang berasal dari pendidikan pesantren dan agama Islam. Pada tahun 1911, pemerintah Belanda mulai mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah dan membuka sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi.

> "untuk jenjang sekolah dasar untuk pribumi, terdapat 348 *volkschool* (sekolah desa) dan 45 *vervolgschool* (lanjutan sekolah desa). Masih dalam jenjang pendidikan dasar, di Aceh terdapat delapan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) dan sekolah kerajinan tangan. Disamping itu masih terdapat empat ELS (*Europeesche Lagere School*) yaitu sebuah pendidikan dasar yang dikhususkan untuk anak-anak eropa. Sedangkan pada tingkat menengah, hanya terdapat sebuah sekolah saja yakni MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*)" (Nazaruddin Sjamsuddin, 1999:25).

Meskipun jumlah anak-anak di Aceh yang mengenyam pendidikan meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi pertumbuhan kelompok cendikiawan berlangsung lambat. Terbatasnya pertumbuhan kaum cendikiawan ini tentu saja disebabkan oleh pembatasan-pembatasan yang diterapkan Belanda dalam bidang pendidikan.

Politik Belanda menetralisir lembaga-lembaga pendidikan dari pengaruh agama telah menyebabkan anak-anak Aceh jauh dari pendidikan agama Islam yang menjadi dasar pegangan rakyat Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama menyadari hal ini dan untuk menguatkan kembali pengaruh agama dalam kehidupan asyarakat, maka para ulama mulai membangun madrasah-madrasah dan menghidupkan kembali pendidikan di *dayyah* (pesantren) yang dulu pernah berkembang pada masa Kesultanan Aceh.

Melalui pendidikan barat, pemerintah Belanda mencoba menarik simpatik rakyat Aceh dan juga mengurangi pengaruh para ulama dan radikalisme agama serta untuk memperoleh tenaga-tenaga administratif yang terampil dan murah, sehingga dapat diharapkan mengurangi perlawanan-perlawanan rakyat Aceh.

4.2 Pembahasan

Perang Belanda di Aceh yang meletus sejak tahun 1873 hingga tahun 1942 merupakan sebuah proses panjang penaklukan suatu daerah di Indonesia yang pernah dilakukan oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengakhiri perang yang telah banyak memakan korban jiwa baik dari rakyat Aceh maupun dipihak Belanda sendiri. Semangat pantang menyerah yang ditujukan oleh rakyat Aceh dalam mempertahankan daerahnya menjadi kekhasan tersendiri bagi rakyat Aceh, dimana jiwa dan raga mereka pertaruhkan demi melawan penjajah yang dianggap penjelmaan kaum-kaum kafir yang tertuang dalam semangat Perang Sabil (Perang di Jalan Allah).

Upaya-upaya yang dilakukan Belanda dalam upayanya menaklukkan Aceh antara lain menggunakan v*orte verklaring* (perjanjian pendek), menggunakan Uleebalang sebagai sekutunya, menjauhkan Ulama dari rakyat dan melakukan politik pasipikasi atau cara-cara simpati untuk menarik hati rakyat Aceh. Namun,

berbagai usaha-usaha ini tidak mampu memadamkan perlawanan Rakyat Aceh secara keseluruhan, dimana masih terdapat perlawanan-perlawanan yang sengit sampai menjelang masuknya Jepang ke Indonesia tahun 1942.

Upaya untuk menaklukkan perlawan rakyat Aceh diawali dengan pemaksaan terhadap Sultan Muhammad Daud Syah menandatangani *vorte verklaring* yang berisi tentang penyerahan Sultan dan peryataan tunduk kepada pemerintah Kolonial Belanda. Pemaksaan ini ditandai dengan ketidakberdayaan Sultan akan kondisinya, dimana isteri dan keluarganya terlebih dahulu ditahan oleh Belanda. Pemberlakuan vorte verklaring ini tidak hanya terjadi pada Sultan saja, tetapi diberikan juga kepada para pejuang atau tokoh-tokoh perlawanan yang tertangkap dan menyerahkan diri.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pada awalnya *vorte verklaring* yang ditandatangani oleh Sultan didasarkan asumsi bahwa dengan menyerahnya Sultan dan para pengikut yang lainnya, maka perlawanan-perlawanan Rakyat Aceh yang terjadi diberbagai daerah dapat dipadamkan. Namun kenyataannya, meskipun Sultan telah menandatangani vorte verklaring pada tahun 1903, perlawanan Rakyat Aceh terhadap pemerintah Kolonial Belanda tetap berlangsung diberbagai daerah sampai tahun 1942.

Penandatanganan *vorte verklaring* oleh Sultan ternyata tidak memiliki arti politis bagi perlawanan Rakyat Aceh, hal ini disebabkan pertama, kedudukan Sultan sebagai raja di Aceh tidaklah mutlak. Untuk melaksanakan suatu keputusan apalagi yang penting, Sultan harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan pembesar-pembesarnya. Kedua, sejak semula Belanda sendiri tidak

mengakui Sultan Muhammad Daud Syah sebagai seorang Sultan. Ketiga, sebelum Sultan menyerah, kekuasaan pemerintahan Aceh telah dipindahkan atau diambil alih para pejuang, dalam hal ini terutama para Ulama, dan yang keempat wilayah Aceh yang masih bebas dari kekuasaan *de facto* Belanda masih cukup luas.

Bahkan Snouck Hurgonje, sebagai simbol suksesnya startegi Belanda dalam mengahadapi perlawanan rakyat Aceh mengatakan mendesak pemerintahnya agar menhentikan ikhtiar mencari hubungan dengan dengan sultan dan beliau menganjurkan agar mencari dan selalu menyerang keberadaan para ulama yang dianggapnya sebagai ruh perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Perlawanan yang terus menerus dilakukan oleh rakyat Aceh dapat menjelaskan kegagalan awal strategi Belanda dalam hal menggunakan vorte verklaring kepada Sultan dan para pemimpin perlawanan rakyat Aceh lainnya yang menyerah, bahwa Sultan tidak memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap semangat perjuangan rakyat Aceh. Setelah merasa menaklukkan Aceh Belanda menganggap pihaknya telah mempunyai posisi yang cukup kuat di Aceh. Selain itu kemungkinan Belanda setelah pengalaman Perang Aceh, melihat Kesultanan Aceh adalah ancaman bagi mereka karena sultan adalah simbol perlawanan rakyat Aceh kepada Belanda. Pada masa selanjutnya kedudukan sultan semakin terpinggirkan dalam masyarakat Aceh sehingga keturunan sultan lebih mengambil sikap netral.

Hal ini disadari oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga dalam perkembangannya, isi dari vorte verklaring selalu berubah disesuaikan dengan

kondisi dan tujuan siasat Belanda sendiri. Setelah Perang Gayo Alas berakhir tahun 1904, pemerintah kolonial Belanda merubah isi *vorte verklaring* nya, dimana para tokoh perlawanan rakyat Aceh yang tertangkap ataupun menyerah diberikan penghargaan lebih berupa gaji ataupun kedudukan lainnya apabila mau menganggap musuh Belanda sebagai musuh mereka juga, dalam hal ini, pemerintah kolonial Belanda mencoba mengadu domba sesama Rakyat Aceh. Meskipun demikian perlawanan rakyat Aceh masih tetap berlangsung.

Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda setelah menyerahnya Sultan memang menyurut tapi bukan berhenti sama sekali, karena perlawanan ini dilanjutkan oleh para Ulama dan Ulama merupakan pendukung setia dari Sultan. Kaum Ulama memberikan corak agama pada perlawanan Rakyat Aceh ini dengan menyebutnya sebagai Perang Sabil. Mereka terus bergerilya hampir diseluruh wilayah Aceh.

Selain menggunakan *vorte verklaring* sebagai salah satu upayanya untuk memadamkan perlawanan Rakyat Aceh, Pemerintah Kolonial Belanda juga melakukan upaya lain yaitu menggunakan tenaga kaum *Uleebalang*. Berbeda dengan sikap Ulama yang terus mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, kebanyakan para *Uleebalang* bersedia bekerjasama dengan Belanda.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, perbedaan sikap yang ditunjukkan sebagian para *Uleebalang* sudah dapat dilihat dari masa awal ketika terjadinya Perang Aceh meletus., dimana banyak para *Uleebalang* yang bersedia menandatangani *vorte verklaring* dan menyatakan kesetiaanya pada perintah raja atau ratu Belanda. Antara tahun 1874-1876 saja tercatat 31 uleebalang yang

menandatangani perjanjian ini. Kondisi ini didukung dengan menyerahnya Sultan dan semakin kerasnya tindakan pemerintah kolonial Belanda terhadap perlawanan rakyat Aceh.

Para *Uleebalang* juga melihat begitu kuatnya tentara Belanda dan sulit unttuk dilawan. Para *uleebalang* mengatakan bahwa sikap menyerah kepada Belanda tidaklah salah karena Belanda tidak akan merubah atau melarang mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Nampaknya, siasat Belanda dengan merekrut dan memberikan fasilitas lebih kepada para *Uleebalang* banyak membuahkan hasil dalam rangka memadamkan perlawanan rakyat Aceh pasca terjadinya Perang Gayo Alas. Untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang lebih menjadi menjadi dasar utama pertimbangan para *Uleebalang* untuk memihak kepada Belanda ketimbang maju berperang melawan Belanda.

Sikap oportunis *Uleebalang* ini disatu pihak bertemu dengan kepentingan Belanda dipihak lain. Belanda memanfaatkan keadaan para *Uleebalang* dengan menyodorkan vorte verklaring yang sudah diperbaharui menjadi Uniform Model Verklaring, dimana para *Uleebalang* dijadikan sebagai raja didaerahnya masing-masing dengan jabatan *Zelfbestuurder*. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda untuk memerangi kaum Ulama yang masih gigih mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda.

Pengalaman Belanda dalam Perang Aceh telah membuat Belanda amat berhati-hati dalam memperlakukan para *Uleebalang* dan Rakyat Aceh. Ketergantungan terhadap kekuatan elite politik lokal ini membuat Belanda memberikan fasilitas ataupun keistimewaan lebih kepada *Uleebalang*. Namun, segala keuntungan dan

keistimewaan yang didapat para *uleebalang* bukan berarti diberikan begitu saja oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai konsekuensinya, para *Uleebalang* harus membantu kepentingan-kepentingan Belanda, terutama memerangi para ulama dan memadamkan perlawanan rakyat Aceh diberbagai daerah di Aceh.

Sistem pemerintahan tidak langsung yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda mencerminkan strategi Belanda menggunakan tenaga *Uleebalang* untuk menaklukkan perlawanan Rakyat Aceh. Dalam hal ini, Belanda mengakui kepemimpinan *Uleebalang* sebagai pimpinan yang mempunyai pemerintahan sendiri didaerahnya masing-masing. Namun, pemerintahan tidak langsung itu tidak saja menjadikan para Uleebalang sebagai penyangga antara Belanda dengan para gerilyawan, melainkan juga sebagai musuh para gerilyawan. Para *Uleebalang* diharuskan oleh Belanda memperlakukan musuh kaum kolonial sebagai musuh bersama mereka sendiri.

Cara yang digunakan Belanda dengan menggunakan tenaga para *Uleebalang* cukup efektif meredam perlawanan-perlawanan para gerilya. Keberhasilan pasukan Belanda dalam menumpas pasukan gerilyawan disebabkan karena adanya pengkhianatan orang-orang Aceh sendiri, yaitu kaum bangsawan yang menjadi kolaborator Belanda. Para *Uleebalang* juga mencoba membujuk para Ulama yang masih berjuang untuk menyerah kepada Belanda. Para *Uleebalang* beralasan bahwa dunia tidak seperti dulu lagi dimana Rakyat Aceh bersama-sama menghadapi Belanda.

Keberpihakan serta kesibukan para *Uleebalang* memperkaya diri sendiri menyebabkan mereka tidak lagi menghiraukan kepentingan rakyat dan perlawanan Rakyat Aceh yang terus berlangsung, bahkan cenderung membantu Belanda menumpas gerakan perlawanan Rakyat Aceh. Kebanyakan para *Uleebalang* hidup mewah ditengah rakyatnya yang miskin dan penuh kebencian kepada Belanda. Kondisi ini menimbulkan kebencian Rakyat Aceh, terutama kaum ulama yang terus mengobarkan perlawanan Rakyat Aceh. Ketidaksesuaian antara Uleebalang dan Ulama dalam menyikapi perlakuan Belanda pada akhirnya menimbulkan perselisihan yang begitu tajam antara *Uleebalang* dan Ulama sampai menjelang kemerdekaan Indonesia, dimana terjadi suatu peristiwa perang antara para *uleebalang* dan para Ulama yaitu Perang Cumbok diawal-awal revolusi nasional.

Tidak hanya menggunakan tenaga *Uleebalang* saja Belanda berupaya memadamkan perlawanan Rakyat Aceh, tetapi mereka juga berusaha menjauhkan para Ulama yang menjadi simbol perlawanan Rakyat dari kehidupan sehari-hari Rakyat Aceh. Setelah menyerahnya Sultan dan para pemimpin lainnya, maka perjuangan lanjutan ini semata-mata atas jalan Allah, *fi sabilillah*. Pada hakekatnya faktor Ulama dengan petuah-petuah atau anjuran bahkan pimpinan langsung merekalah yang mengobarkan Perang Aceh agar tetap berlangsung.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, memasuki tahun 1920-an, Aceh mengalami serangkaian perubahan. Sedikit demi sedikit, Belanda mengambil kontrol atas seluruh Aceh, baik dengan pernerintahan langsung atas wilayah-wilayah Aceh Besar (Kutaraja dan sekitarnya), Singkel (Aceh Timur), Sigli,

Bireun, Lhokseumawe, Lhoksukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Meulaboh, dan Tapak Tuan; maupun pemerintahan tak langsung (melalui uleebalang) di 93 nanggro di luar tempat-tempat yang diperintah langsung tersebut. Meskipun bentuk-bentuk perlawanan masih ada, tetapi pada saat ini bentuknya menjadi sendiri-sendiri dan sporadis. Pada masa ini Aceh tidak lagi memiliki tokoh pejuang legendaris seperti Teungku Cik di Tiro, Cut Nyak Dien, atau pun tokoh-tokoh lainnya. Para ulama besar pun satu per satu wafat dan kemudian digantikan oleh ulama yang hanya menyibukkan diri dengan kitab-kitabnya. Pengasingan ulama dari kehidupan politik memang mempakan tujuan kebijakan Belanda demi menegakkan *rust en orde* (keamanan dan ketertiban) di Aceh. Ulama digiring hanya untuk mengurusi kepentingan agama saja terlepas dari urusan politik sehingga pengaruh mereka terhadap penduduk menjadi sangat terbatas.

Pengalaman Belanda sendiri telah membuktikan bahwa para ulama memiliki pengaruh yang besar terhadap rakyat dan dapat mempengaruhi rakyat untuk terus berjuang melawan agresi militer Belanda. Pada awalnya upaya Belanda untuk menjauhkan para ulama dari rakyat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, hal ini disadari oleh para pemimpin Belanda. Untuk itu, Belanda mencoba merubah strateginya melalui cara yang lebih halus lagi, dimana mereka tidak hanya mengadu domba antara *Uleebalang* dan Ulama dan mengejar terus keberadaan Ulama yang masih mengadakan perlawanan. Salah satu tindakan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah sekuler sebagai pembanding dayah-dayah yang dikelola oleh para Ulama.

Pengaruh ulama makin lama makin berkurang dengan mulai diperkenalkannya sistem pendidikan sekuler di Aceh yang segera menyaingi sistem pendidikan yang telah lama ada yaitu dayah atau pesantren. Pengenalan sistem pendidikan sekuler oleh Belanda tampaknya mempunyai tujuan ganda yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan birokrasi dan terutama untuk membendung tekanan pendidikan ulama yang selalu mengutuk Belanda yang kafir kepada anak-anak Aceh. Sejak tahun 1907, sekolah sekuler telah diperkenalkan di Aceh berupa Sekolah Desa (*Volkschool*), sedangkan Sekolah Menengah Pertama (MULO) baru didirikan di Kutaraja pada tahun 1930. Pendidikam sekuler ini terutama ditujukan kepada kaum *uleebalang* yang memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi.

Kemajuan sekolah-sekolah sekuler yang disokong Belanda, telah merugikan pendidikan agama dan menimbulkan perkembangan politik yang rumit di Aceh antara kepentingan *Uleebalang* dan Ulama. Kondisi ini mampu memecah konsentrasi perlawanan Rakyat Aceh terhadap Belanda. Para Ulama mulai memikirkan perkembangan dakwah mereka, sehingga mulai muncul pemikiran untuk mendirikan sekolah-sekolah agama untuk menyangi sekolah-sekolah sekuler yang didirikan oleh Belanda. Ini juga menjadi dilema bagi gerakan para ulama yang terus mencoba mengobarkan perang melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Bagi para ulama, bagaimana mungkin kita mendirikan atau memajukan pengajaran agama Islam kalau mereka sendiri masih dikejar-kejar oleh tentara Belanda.

Ulama sebagai elite agama pada akhirnya terpecah-pecah dalam tiga kelompok. Pertama, Ulama yang duduk sebagai *kadi* dalam pemerintahan *Uleebalang*. Kedua, Ulama yang telah menarik diri dari gerakan melawan Belanda. Ketiga, Ulama yang terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Perbedaan pandangan di antara Ulama ini menyebabkan pengaruh Ulama pun sedikit demi sedikit mulai berkurang. Sikap para Ulama terlihat dari antusiasme ulama-ulama dalam mendirikan sekolah-sekolah agama yang dapat dikatakan merupakan bentuk perlawanan ulama terhadap pendirian sekolah-sekolah sekuler Belanda. Pada akhirnya bentuk perlawanan ulama ini kemudian lebih menjadi nyata dengan berdirinya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang mempererat ikatan ulama-ulama di seluruh Aceh.

Cara kekerasan yang digunakan Belanda dalam usahanya menaklukkan perlawanan Rakyat Aceh ternyata berdampak pada kebencian yang mendalam Rakyat Aceh pada tentara Belanda yang dianggap *kaphe* (kafir). Untuk itu, pemerintah Belanda mulai menyadari tindakan kekerasan terhadap Rakyat Aceh tidak dapat memadamkan perlawanan Rakyat Aceh secara keseluruhan. Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mencoba menerapkan politik pasipikasi yaitu politik yang menunjukkan sifat damai, dimana Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada Rakyat Aceh dan berusaha menimbulkan rasa simpatik Rakyat Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, perubahan sikap yang diperlihatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini berupa pembangunan sarana dan prasarana kehidupan Rakyat Aceh. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membangun

sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan-jembatan, irigasi dan pelabuhan-pelabuhan. Antara tahun 1915 – 1918 pembuatan jalan di Aceh terus mengalami peningkatan, terutama jalan-jalan yang menghubungkan ke daerah pedalaman dengan maksud memudahkan gerak pasukan Belanda menghadapi gerilyawan Aceh.

Selain pembangunan sarana transportasi, pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan pembaharuan dibidang lainnya seprti pertanian, perbankan dan pendidikan. Manfaat pembaharuan-pembaharuan ini mulai dirasakan rakyat Aceh dan para ulama yang masih mencoba menentang kekuasaan Belanda, sehingga perlawanan-perlawanan rakyat Aceh yang awalnya cukup merepotkan Belanda mulai berkurang. Dengan bantuan para *uleebalang* program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berhasil mengurangi pandangan buruk rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial belanda. Hal ini memudahkan Belanda untuk menanamkan pengaruhnya dan menakluk Aceh secara keseluruhan demi pembulatan negeri jajahan di Indonesia.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Belanda dalam usahanya menaklukkan dan memadamkan perlawanan Rakyat Aceh, upaya menggunakan tenaga *Uleebalang* peneliti anggap lebih memiliki pengaruh yang besar dalam menaklukkan perlawanan Rakyat Aceh. Hal ini dikarenakan *Uleebalang* memiliki kedudukan yang strategis dimata Rakyat Aceh, baik sebagai pemimpin lokal maupun pengaruh yang dimiliki para *Uleebalang*. Tenaga uleebalang juga dimanfaatkan pemerintah kolonial Belanda untuk mensukseskan program-program ataupun kepentingan-kepentingan Belanda di Aceh. Selain itu,

Pemerintah Kolonial Belanda dapat memecah kekuatan perlawanan yang dimiliki oleh Rakyat Aceh. Kalau pada awal terjadinya Perang Aceh, Belanda harus menghadapi dua kekuatan utama Rakyat Aceh yaitu para *Uleebalang* dan Ulama. Namun, dalam perkembangannya Belanda berhasil membujuk dan mempengaruhi para *Uleebalang* untuk berpihak kepada Belanda dan memerangi para Ulama dan Rakyat Aceh yang melakukan perlawanan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda secara umum hanya berhasil meredam perlawanan Rakyat Aceh agar tidak membesar dan membahayakan kedudukan Belanda di Aceh. Perlawanan-perlawanan Rakyat Aceh sendiri terus berlangsung meskipun berskala kecil dan sporadic hingga tahun 1942. Hal ini menandakan kebencian yang begitu mendalam dihati rakyat Aceh terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Upaya Pemerintah Kolonial Belanda dengan menggunakan tenaga *Uleebalang* sendiri telah memunculkan konflik antar kelas yang ada, yaitu antara kaum *Uleebalang* dan Ulama yang nanti pada awal masa revolusi Indonesia pecah menjadi revolusi sosial dalam bentuk Perang Cumbok

REFERENSI

Soemargono, K, 1992, *Profil Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta, Hlm 4

H.M. Thamrin Z, 2004, *Aceh Melawan Penjajah Belanda*, CV. Wahana, Jakarta, Hlm 48

Syarifuddin Tippe, 2000, *Aceh Di Persimpangan Jalan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, Hlm 1

Ali Hasjmy, 1997, *Hikayat Perang Sabil Menjiwai Perang Aceh Lawan Belanda*. Bulan Bintang, Jakarta, Hlm 114

Ibrahim Alfian, 1987, *Perang Di jalan Allah : Perang Aceh 1873-1912*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 39

James Siegel, 1969, *The Rope of God, California:University of California Press,* Hlm 69

Sartono Kartodirdjo, 1976, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Hlm 211

Ibid., Halaman 212

M.C. Ricklefs, 1991, *Sejarah Indonesia Modern, Gajah Mada University Press,* Yogyakarta, Hlm 220

Ibrahim Alfian., *Op.Cit*, Halaman 68

M.C. Ricklefs., *Op.Cit*, Halaman 221

Ibid., Halaman 221

Sartono Kartodirjo., *Op.Cit, Halaman 223*

Ibrahim Alfian., *Op.Cit*, Halaman 82

M.H. Gayo, 1983. *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialisme Belanda,* Balai Pustaka, Jakarta Hlm 121

Ibrahim Alfian., *Op.Cit*, Halaman 209

M. Said, 1985, *Aceh Sepanjang Abad,* PT.Harian Waspada Medan, Halaman 341

M.H. Gayo., *Op.Cit,* Halaman 143
Ibid., Halaman 165
Ibid., Halaman 190
Ibid., Halaman 204 – 205
Ibid., Halaman 208
Ibid., Halaman 212– 214
Al-Chaidar, 1999, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam,* Madani Press, Jakarta, Hlm 80
Rusdi Sufi dan Agus Budi W, 2004, *Ragam Sejarah Aceh,* Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, Hlm 157
Nazaruddin Sjamsuddin., 1999, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh,* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Halaman 25
M. Said., *Op.Cit,* Halaman 304
Ibid., Halaman 305
Ibid., Halaman 305 – 306
Ibid., Halaman 306 – 307
Ibid., Halaman 567
Eric Morris, 1989, *Aceh Revolusi Sosial dan Pandangan Islam' dalam ergolakan Daerah Pasca Awal Kemerdekeian,* Grafiti Press, Jakarta, Hlm 89
M. Isa Sulairman,1999*, "Adat, Islam, dan Revolusi di Aceh" dalam Panggung Sejarah, editor Henri Charnbert Loir dan Hasan Muarif Ambary,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 527
M. Nazarudin., *Op.Cit,* Halaman 17
Ibrahim Alfian., *Op.Cit,* Halaman 135
Ibid., Halaman 132
Ibid., Halaman 146
Dada Meuraxa, 1989, *Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Tgk. Daud beureueh Cs,* Pustaka Hasmar,Medan, Hlm 36.
Ibid., Halaman 85
Anthony Reid, 1987*, Perjuangan Rakyat:Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 31
Tgk. A.K. Jacoby, 1998, Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 296
Ismail Sunny, 1980, *Bunga Rampai Tentang Aceh,* Bharatara Karya Aksara, Jakarta, Hlm 136
Al chaidar., *Op. Cit,* Halaman 280
M.H. Gayo., *Op.Cit,* Halaman 108
Nazarudin Syamsudin., *Op.Cit,* Halaman 17
Ibrahim Alfian., *Op.Cit,* Halaman 199
Nazaruddin Syamsudin., *Op.Cit,* Halaman 19
M.Nur El Ibrahimy, 1984, *Sekitar Pembaharuan Sistem Pendidikan Agama di Aceh,* Jakarta, Hlm 2
Rusdi Sufi., *Op.Cit,* Halaman 157
Nazarudin Syamsudin., *Op.Cit,* Halaman 25

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Perang Aceh merupakan perang yang sangat melelahkan dan berlangsung sangat lama bagi Belanda dan rakyat Aceh sendiri. Dimulai tahun 1873 sampai dengan tahun 1942, meskipun pada tahun 1903 dengan tertangkapnya Sultan Muhammad Daud Syah pemerintah Belanda telah mengklaim telah menaklukkan Aceh. Namun demikian, setelah tahun 1903 tersebut masih muncul perlawanan-perlawanan dari Rakyat Aceh seperti perlawanan Rakyat Gayo Alas tahun 1904 dan didaerah-daerah lain sampai dengan tahun 1942 walaupun intensitasnya tidak seperti yang terjadi ketika awal-awal perang Aceh dimulai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Upaya Belanda dalam menghadapi perlawanan Rakyat Aceh Pasca Perang Gayo 1904-1942 dimana Belanda berupaya menyusun berbagai macam strategi untuk dapat menguasai daerah aceh

secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat empat upaya yang dilakukan Belanda, Yaitu :

1. Menggunkan Vorte Velklering (Traktat Pendek)

   Selama perang Aceh, Van Heutz telah menciptakan surat pendek (Vorte Velklering) tentang penyerahan yang harus ditanda tangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Dimana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja mengakui daerahnya sebagai dari daerah Hindia Belanda, Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan diluar negeri, Raja berjanji akan mematuhi seluruh perintah yang ditetapkan oleh Belanda. Jadi, dengan adanya surat pendek yang ditanda tangani para pemimpin Aceh Belanda lebih mudah untuk dapat menguasai Aceh, Namun penggunaan Vorte velklering tidak sepenuhnya berhasil, sehingga Belanda berusaha menyusun upaya selanjutnya.

2. Menggunakan Teanaga Uleebalang

   Untuk dapat mudah menguasai Aceh tanpa adanya perlawanan Belanda mendekati Uleebalang,karena Uleebalang mempunyai peranan yang penting di Aceh.dan untuk menarik simpatik para Uleebalang, Belanda memberikan berbagai keistimewaan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh Uleebalang yaitu seperti gaji, jabatan dan garis garis yang jelas bagi daerah kekuasaan mereka, dan sebaliknya Uleebalang memberikan kebebasan kepada Belanda diwilayah Aceh. Hubungan yang terjadi antara Belanda dan Uleebalang ini saling menguntungkan. Tapi keistemewaan yang diberikan Belanda kepada Uleebalang tidak diberikan

begitu saja sebagai konsekwesinya, Belanda berhak mengatur penarikan pajak yang tadinya dimonopoli oleh Uleebalang, selain itu juga Belanda ingin mengadu domba antara Uleebalang dan Ulama.

3. Menjauhkan Ulama dari rakyat

Ulama mempunyai pengaruh yang besar di Aceh, sehingga belanda sangat khawatir jika Ulama ini dibiarkan maka akan mengancam keselamatan Belanda di Aceh. Untuk itu belanda berupaya menjauhkan Ulama dari Rakyat Aceh dengan cara memburu para tokoh tokoh penting Ulama dan membangun pendidikan sekuler. Cara ini dimaksudkan agar pengaruh perang sabil dari Ulama tidak berkembang di Aceh, sehingga Belanda bebas menanam kekuasaanya di Aceh.

4. Menggunakan Cara simpatik

Cara kekerasan yang digunakan Belanda dalam usahanya menaklukkan perlawanan Rakyat Aceh ternyata berdampak pada kebencian yang mendalam Rakyat Aceh pada tentara Belanda yang dianggap *kaphe* (kafir). Untuk itu, pemerintah Belanda mulai menyadari tindakan kekerasan terhadap Rakyat Aceh tidak dapat memadamkan perlawanan rakyat Aceh secara keseluruhan. Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mencoba menerapkan politik pasipikasi yaitu politik yang menunjukkan sifat damai, dimana Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada Rakyat Aceh dan berusaha menimbulkan rasa simpatik Rakyat Aceh. Politik pasipikasi mulai diperlihatkan Belanda dengan membangun sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan-jembatan, irigasi-irigasi dan pelabuhan-pelabuhan.

5.2 Saran

1. Dalam membuat tulisan mengenai sejarah lokal yang terjadi di suatu daerah hendaknya melihat permasalahan secara obyektif
2. Bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Perang Aceh agar menyempurnakan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini.